

**ANALISIS DAMPAK *LOBBY* YAHUDI TERHADAP KEBIJAKAN
LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DI TIMUR TENGAH
(Kasus Masa Pemerintahan George W. Bush)**



BOSOWA
Skripsi

*Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Jurusan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Hubungan Internasional*

Oleh :

Hendrikus Bebe Aran

45 03 023 025

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 45
MAKASSAR
2007**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : **Analisis Dampak *Lobby* Yahudi Terhadap Kebijakan Luar Negeri AS Di Timur Tengah (*Kasus Masa Pemerintahan George W. Bush*)**

Nama : **Hendrikus Bebe Aran**
Stambuk : 45 03 023 025
Jurusan : Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi pada Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Makassar.

Pembimbing I



Dra. Asmirah, M.Si

Pembimbing II



Arief Wicaksono, S.Ip

Mengetahui,
Dekan FISIP Univ. "45" Mks



Dra. Asmirah, M.Si

Menyetujui,
Ketua Jurusan



Ismah Tita Ruslin, S.Ip., M.Si

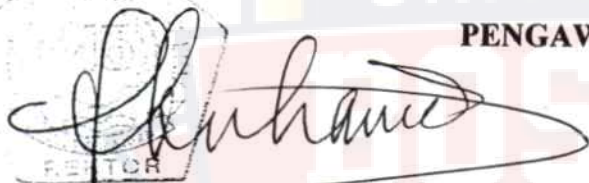
HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari *Selasa*..., tanggal *27*..., Bulan *November*....., Tahun *2007*.....
skripsi dengan Judul : “**Analisis Dampak Lobby Yahudi Terhadap Kebijakan Luar Negeri AS di Timur Tengah (Kasus Masa Pemerintahan George W. Bush)**” oleh :

Nama : **Hendrikus Bebe Aran**
Stambuk : 45 03 023 025
Jurusan : Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Telah diterima oleh Panitia Ujian Sarjana Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas “45” Makassar, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Negara (S1) pada Jurusan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional.

PENGAWAS UMUM :

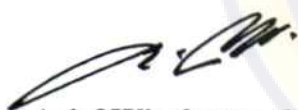


Prof. DR. H. Abu Hamid
Rektor Univ. “45” Makassar



Dra. Asmirah, M.Si

PANITIA UJIAN :




Arief Wicaksono, S.Ip
Wakil Dekan



Ismah Tita Ruslin, S.Ip., M.Si
Ketua Jurusan

TIM PENGUJI :

1. Drs. Husain Hamka, M.Si
2. Dra. Asmirah, M.Si
3. Ismah Tita Ruslin, S.Ip, M.Si
4. Seniwati, S.Sos., M. Hum



(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

ABSTRAKSI

Hendrikus bebe Aran, 45 03 023 025, skripsi berjudul : Analisis Dampak Lobby Yahudi Terhadap Kebijakan Luar Negeri AS di Timur Tengah (Kasus Masa Pemerintahan George W. Bush), di bawah arahan Ibu Dra. Asmirah, M.Si selaku pembimbing I, dan Bapak Arief Wicaksono, S.Ip selaku pembimbing II.

Aktivitas Lobby Yahudi telah berlangsung lama dalam tatanan politik tingkat tinggi di Amerika Serikat. Komunitas penggiat lobi yang sangat pro terhadap Israel ini memiliki pengaruh yang cukup besar dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan Luar Negeri AS di Timur Tengah. *American-Israel Public Affairs Committee (AIPAC)*, salah satu kelompok lobi Yahudi terbesar di AS, misalnya, bahkan oleh pemerintahan George W. Bush dijadikan mitra dalam penyusunan kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah. Hal ini menjadikan kebijakan AS di Timur Tengah sangat tidak berimbang dan sarat kepentingan Israel.

Analisa mengenai hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana aktivitas lobby Yahudi berdampak bagi pengambilan keputusan politik luar negeri Pemerintahan George W. Bush terhadap Timur Tengah dan bagaimana korelasinya dengan menurunnya legitimasi politik Bush dalam negeri maupun di dunia internasional.

Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analitis, dimana penulis menggambarkan terlebih dahulu aktivitas Lobby Yahudi dalam tubuh pemerintahan AS kemudian dengan menggunakan teknik analisa yang bersifat kualitatif, penulis menganalisis permasalahan yang digambarkan melalui data-data yang ada dan menghubungkan satu fakta dengan yang lainnya. Data-data yang bersifat kuantitatif bertujuan untuk memperkuat analisis kualitatifnya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan penulis terhadap masalah terkait, ada beberapa hal yang menjadi pokok persoalan yakni bahwa komunitas Lobby Yahudi telah mampu mengarahkan para pengambil keputusan politik luar negeri AS untuk mengesampingkan national interest AS dan menjadikan kepentingan Israel sebagai prioritas. Jika dicermati, AS sebagai sebuah Negara hanya merupakan perwajahan sedangkan otak dan jiwanya adalah Yahudi.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan kurnia-Nya yang telah kita terima. Terima kasih pula atas segala restu-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ini.

Penulis menyadari bahwa dalam upaya penyelesaian karya ini, penulis seringkali menemui tantangan dan hambatan. Kendati demikian, dengan niat, kehendak dan tekad yang kuat serta doa dan dukungan dari berbagai pihak akhirnya karya ini dapat terselesaikan.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan baik dari sistematika penulisan, data-data kualitatif, maupun pada analisa pembahasan sehingga segala bentuk masukan dan bimbingan yang sifatnya konstruktif sangat penulis harapkan demi adanya upaya-upaya perbaikan selanjutnya. Hal ini penting demi memperkaya pemahaman kita tentang persoalan-persoalan kebijakan luar negeri AS di Timur-Tengah serta variabel-variabel yang turut mempengaruhinya.

Rasa terima kasih yang tulus penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abu Hamid, selaku Rektor Universitas "45" Makassar beserta seluruh staf dan pegawai rektorat Universitas "45" Makassar
2. Ibu Dra. Asmirah, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Makassar sekaligus Pembimbing I, atas segala masukan dan bimbingannya.
3. Bapak Arief Wicaksono, S.Ip selaku Pembimbing II yang selalu memberikan masukan dan bimbingan selama penulisan skripsi ini sehingga karya ini bisa terselesaikan.

4. Ibu Isma Titah Ruslin, S.Ip, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik Fakultas ISIPOL Universitas "45" Makassar. Terima kasih atas segala masukannya.
5. Bapak Muslimin, S.Sos atas segala bantuan dan masukan yang telah diberikan kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen Universitas "45" Makassar yang telah mengajari penulis selama masa perkuliahan di Universitas "45" Makassar.
7. Terima kasih juga penulis haturkan untuk seluruh staf dan pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univ."45" Makassar yang selama ini telah membantu urusan administrasi perkuliahan dan urusan akademik penulis.
8. Sembah sujud dan terima kasih tak terhingga ananda untuk Bapak Kamilus Gara Taran dan Mama Theresia Uba atas Cinta, kasih sayang, perhatian dan dukungan yang telah kalian berikan sepanjang hidupku. *"Semoga Tuhan selalu menganugerahkan Rahmat kesehatan dan usia yang panjang."*
9. Sujud dan terima kasih juga penulis haturkan untuk keluarga besarku; Ka Rina,sek., Ka Nini, sek., Ka Sesi,sek., Ka Ansel,sek., Ka Wae Pekhan,sek., Ka Berthus,sek., Ka Isabella,sek. Terima kasih atas segala perhatian dan dukungan baik moril maupun materiil. *"Semoga Kasih dan Karunia Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah kita dan semoga Ia selalu melimpahkan berkat dan rejeki berlimpah bagi kita."*
10. Keluarga Ka Donatus di Palopo dan Ka Eman di Soroako. Terima kasih untuk segala dukungannya.
11. Special Thanks to My Soul, *Y. Ratna Dwi Kartikasari*. Makasih banyak atas segala dukungan dan motivasinya.

12. Terima kasih juga untuk My Brother **Ampit 17-naeng & Jitha Tocan**. *Thanks for your support*. Untuk teman **Kristian Nova**, *thanks for "Sejarah Zionisme-nya"*.
13. *Thanks to* teman-temanku penghuni **Basecamp '03 FISIP UNIV. '45 MAKASSAR**, **Deden & Echa, Cowo Tampan Setiawan, Ienk Cakep, Edy Kurniawan, Illank Ganteng, Wawan Kurniawan**. Salam kompak selalu.
14. Untuk Keluarga Besar **BEM FISIPOL Univ.'45 Makassar**. Semoga tetap solid.
15. Jajaran Pengurus dan anggota **HIMAHI Univ.'45 Makassar**.
16. Terima kasih untuk keluarga besar **Opu A. Baso Mappesammeng**, serta seluruh masyarakat Desa Tamuku Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara yang telah membantu penulis selama masa KKN.
17. Terima kasih juga untuk teman-temanku di **FKPPM-BTT Flotim-Makassar**. *I hope we always remember that "our future in our hand."*
18. Ucapan terima kasih tak lupa penulis sampaikan untuk semua pihak yang dengan caranya masing-masing telah membantu penulis hingga terselesaikannya karya ini.

Makassar, November 2007

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN
HALAMAN PENERIMAAN
ABSTRAKSI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

	hal.
BAB I Pendahuluan	
A. Judul Penelitian.....	1
B. Latar Belakang.....	1
C. Batasan dan Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Rancangan Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II Tinjauan Pustaka	
A. Konsep Kepentingan Nasional.....	15
B. Konsep Politik Luar Negeri.....	22
C. Pengertian Lobby.....	31
BAB III Gambaran Umum Masalah	
A. Pemikiran dan Praktek Lobi Yahudi di AS.....	34
B. Kebijakan Luar Negeri Pemerintahan Bush di Timur Tengah.....	46
1. Dukungan terhadap Israel.....	46
2. Perang Afghanistan.....	50
3. Invasi militer ke Irak.....	52
4. Sikap AS atas Isu nuklir Iran.....	54
5. Undang-undang Restorasi Kedaulatan Lebanon dan Akuntabilitas Syria.....	57
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	
A. Pengaruh Lobi Yahudi terhadap Kebijakan Luar Negeri AS	

di Timur Tengah.....	59
1. Dukungan terhadap Israel.....	60
2. Perang Afghanistan.....	68
3. Invasi militer ke Irak.....	75
4. Sikap AS atas Isu Nuklir Iran.....	82
5. Undang-Undang Restorasi Kedaulatan Lebanon dan Akuntabilitas Syria.....	87
B. Dampak Kebijakan Luar Negeri AS di Timur Tengah terhadap Legitimasi Politik George W. Bush.....	92
1. Legitimasi Politik Bush di Amerika Serikat.....	94
2. Legitimasi Politik Bush di Dunia Internasional.....	100
BAB V Kesimpulan dan Saran	
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

A. Judul Penelitian

Analisis Dampak *Lobby* Yahudi Terhadap Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Timur Tengah (Kasus Pada Masa Pemerintahan George W. Bush).

B. Latar Belakang

Masyarakat Amerika Serikat berkembang dengan ditemukannya benua tersebut pada abad ke-15 Masehi. Mereka tumbuh dengan pemikiran rasial yang bersumber dari pemikiran bangsa Yahudi. Mereka memandang dirinya lebih tinggi dibanding bangsa lain. Saat itu, kendali dipegang oleh kaum puritan Inggris yang sangat keras memegang peradaban Ibrani. Burhanuddin Daya mengungkapkan:

“...selanjutnya mereka yang disebut bangsa Ibrani (*Hebrew*) berasal dari kata *Ibri* atau *Ibrani*, berasal dari *fi'il tsulatsi* (kata kerja berhuruf tiga) *'abara* yang berarti memotong jalan atau menyebrangi lembah, menyebrangi sungai atau melalui jalan pintas karena tempat kediaman mereka di seberang sungai Eufrat....dan ini semua mengandung arti “bertukar-tukar” atau berpindah-pindah tempat”, sesuai dengan kebiasaan hidup nomaden penghuni padang pasir dan penduduk-penduduk kampung jauh yang terpencil. Dengan demikian, perkataan *Ibri* sama artinya dengan badui, yaitu penghuni padang pasir dan penduduk-penduduk kampung yang jauh terpencil.”¹

¹ Burhanuddin Daya dalam Hermawati, *Sejarah Agama dan Bangsa Yahudi*, RajaGrafindo persada-Jakarta, 2005, hal.23

Pada dasarnya, sebutan Ibrani atau Israel merujuk pada hal yang sama yakni Bangsa Yahudi. Mereka tidak menyukai sebutan Ibrani karena mengingatkan mereka pada kehidupan masa lampau yang liar dan kasar.² Kata Yahudi sendiri sebenarnya dinisbahkan kepada Yahuda, salah satu dari dua belas anak Ya'qub bin Ishak bin Ibrahim. Keturunannya inilah yang kemudian dikenal dengan Bani Israel atau bangsa Yahudi. Dari kalangan mereka inilah muncul istilah fundamentalisme.³ Artinya, peradaban Amerika bermula dari kaum puritan Inggris yang sangat ekstrem memegang ajaran ibrani dan menjadikannya sebagai dasar. Kaum puritan Yahudi dengan pemahaman fundamentalismenya inilah yang merupakan dasar terbentuknya wawasan, budaya, dan percaturan politik di Amerika Serikat saat ini.

Secara historis, kaum Yahudi yang hijrah ke Amerika pada masa itu kebanyakan berasal dari kalangan Yahudi Eropa. Bagi orang-orang Yahudi, terbukanya pintu untuk hijrah ke Amerika adalah berkah tersendiri. Sebab selama berabad-abad mereka hidup di Eropa di tengah masyarakat yang selalu menganggap kaum Yahudi sebagai kaum pembawa sial. Yahudi Eropa umumnya menjalankan aktivitas ekonomi yang tidak sehat. Praktek renten atau riba, juga penimbunan barang-barang kebutuhan pokok bukan hal yang haram bagi mereka. Karenanya, wajar jika bangsa-bangsa Eropa membenci kaum Yahudi.

Hidup di tengah masyarakat dan bangsa yang membenci mereka membuat orang-orang Yahudi terkucilkan. Untuk itu terbukanya jalan ke Amerika, tidak

² *Ibid*, hal.23

³ As'ad As-Sahamrani, *Menyingkap Terorisme Dunia*, Terjemahan Erwin Yuandani, Intermedia -- Solo, 2005 hal. 43

mereka sia-siakan. Penemuan benua baru dimanfaatkan oleh kalangan Yahudi yang kaya dan berpendidikan untuk berhijrah. Yahudi Eropa yang hijrah ke AS adalah Yahudi dari kalangan elit, terpelajar dan kaya. Dengan latar belakang yang demikian, masyarakat Yahudi ini dengan cepat merebut posisi-posisi sosial dan politik yang penting di AS. Posisi dan kedudukan mereka semakin hari semakin menguat dan mereka berhasil merebut kendali pemerintah dan negara sebesar AS. Artinya, setiap langkah AS disetir oleh kalangan Yahudi yang lazim disebut *Lobby*.

Todd mengungkapkan bahwa: "beberapa penafsiran yang menegaskan peran komunitas Yahudi di Amerika dan kapasitasnya untuk mempengaruhi politik, memang cukup akurat. Inilah teori "*Jewish Lobby*" yang didesain sebagai sebuah teori tentang ketiadaan lobby Arab".⁴

Salah satu gerakan paling nyata dari kalangan Yahudi, termasuk kelompok Yahudi AS, yang hingga kini tetap eksis dan turut berperan dalam percaturan politik dalam negeri di AS adalah Zionisme politik.

Gerakan Zionisme Politik pada awalnya hanya merupakan impian seorang wartawan Theodore Herzl yang kemudian sukses menjalankan programnya dalam waktu relatif singkat yakni sekitar lima puluh tahun setelah kongres I Zionis di Basel, Swiss tahun 1892. Ideologi Zionisme sebenarnya sudah berkembang di kalangan warga Yahudi, terutama kaum *Askhenazi* di Eropa namun baru di tangan Theodore Herzl, gerakan Zionisme mencapai terobosan (breakthrough) yang sangat penting.

⁴ Emmanuel Todd, *Menjelang Keruntuhan Amerika*, Terjemahan Siwi Purwandari, Menara -- Bekasi, 2006 hal.149

Kongres I Zionis yang berlangsung di Basel, Swiss, Agustus 1897, berhasil merumuskan tujuan gerakan Zionis : “ Zionisme bertujuan mendirikan perumahan bagi bangsa Yahudi di Palestina yang dijamin dengan undang-undang”.⁵ Inilah yang menjadi dasar pergerakan dan perjuangan selanjutnya.

Kendati demikian, untuk kalangan Zionis Amerika, baru setelah pecah perang dunia II, mereka mulai mendapat pengaruh dan didengarkan oleh pemerintahan di Washington. Hal ini merupakan puncak hasil perjuangan yang sporadis yang dilakukan oleh satu generasi Zionis Amerika sebelumnya, yang diantaranya ditandai dengan persetujuan pemerintah AS terhadap Liga Bangsa-Bangsa tahun 1924 yang memberikan mandat kepada Inggris dan menjamin hak-hak bangsa Yahudi di Palestina. Setiap Presiden AS sejak Woodrow Wilson selalu memberikan pernyataan yang mendukung kaum Zionis, dan mayoritas anggota kongres berkali-kali mengambil langkah yang menunjukkan sikapnya yang pro zionis, baik secara informal maupun dalam membuat deklarasi politik bersama.

Berdasarkan pemaparan di atas, kebijakan politik luar negeri AS juga diwarnai dengan prinsip-prinsip, wawasan, dan pemikiran kaum Ibrani. Salah satu bentuk kebijakan luar negeri yang dimaksud adalah menyebarkan pangkalan-pangkalan militer dan kapal-kapal perangnya di berbagai negara. AS juga mempersiapkan angkatan bersenjata mereka untuk apa yang mereka sebut “campur tangan kilat”. Disini, Pemerintah Amerika hanya ingin menunjukkan kepada dunia

⁵ Jacob Katz, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Zionisme*, terjemahan Joko Susilo, Pustaka Progresif- Surabaya, 1997 hal. 128.

bahwa pasukan militernya senantiasa siap menghadapi kemungkinan terburuk sekalipun ketika berhadapan dengan musuh, kapanpun dan dimanapun juga.

Dokumen yang berjudul *The National Security Strategi of United States of Amerika* yang diserahkan Bush kepada kongres Amerika pada tanggal 20 september 2002 semakin menegaskan hal tersebut. Bush mengungkapkan bahwa tentara Amerika akan memprioritaskan perlindungan bagi Amerika. Setelah itu, baru memperhatikan keamanan sekutu-sekutunya, melindungi kepentingan Amerika dan sekutu-sekutunya, membuat setiap musuh kalah telak. Dan bukti strategi Amerika ini adalah tersebarnya kekuatan militer di banyak negara di dunia.⁶

Gambaran di atas seolah menegaskan pandangan banyak kalangan di awal abad ke-21 bahwa Amerika Serikat merupakan negara adikuasa yang menguasai dunia layaknya imperium Romawi kuno yang memiliki kekuatan militer menakjubkan. Tindakan Amerika yang memamerkan kekuasaannya dengan memilih meneruskan aksi militer dan jalur diplomasi dengan negara-negara kecil yang dikenal sebagai efek tragis poros kejahatan sama sekali tidak menggambarkan substansi dari pandangan tersebut.

Perang Afganistan bisa menjelaskan hal tersebut di atas. Segera setelah tragedi 11 september, Bush menyampaikan pidato dihadapan kongres AS dan menyatakan rencananya untuk memerangi terorisme. Perang yang oleh Bush dimaksudkan untuk membersihkan dunia dari kejahatan. Operasi militer, yang

⁶ As'ad As-Sahamrani, *Menyingkap Terorisme Dunia*, Terjemahan Erwin Yuandani, Intermedia – Solo, 2005 hal. 32

awalnya diberi nama *Operation Infinite Justice* (Operasi Keadilan Tanpa Batas) tetapi kemudian diganti dengan *Operation Enduring Freedom* (Operasi Kebebasan yang Terus Bertahan)⁷, ditujukan untuk memburu Osama bin Laden dan jaringan Al Qaeda dengan menyerang Uni Emirat Afganistan yang disinyalir melindunginya.

Akan tetapi, apakah keputusan kongres yang menyetujui penggunaan anggaran sebesar US\$ 40 miliar hanya untuk memburu Osama dan menyerang Afganistan, sebuah negara yang secara kapabilitas tidak sebanding dengan AS, bisa dikatakan sebagai kebijakan yang logis dan rasional? Emmanuel Todd mengungkapkan:

Apa yang selanjutnya terjadi bukan mikro-militerisme teatrikal, tetapi perang 'bodoh' dan berdarah. Perang yang sangat merugikan Amerika Serikat, menghabiskan asset manusia dan finansialnya dan hanya menghasilkan efek negatif pada kekuatan Amerika.⁸

Bagaimanapun juga, politik konfrontatif yang terus digulirkan oleh AS, juga penggunaan kekuatan militer dan dukungan terhadap kolonisasi Israel tidak lepas dari pengaruh pelbagai macam hal. Salah satunya adalah pengaruh kelompok masyarakat yang dominan yakni kaum Yahudi.

Politik Luar Negeri yang diambil AS terkait persoalan di kawasan Timur Tengah mengindikasikan betapa AS dengan segala kebijakannya selalu berpihak pada kaum Yahudi. Dengan demikian, usaha memahami setiap kebijakan yang ditempuh AS terkait persoalan di Timur Tengah harus selalu dibarengi dengan usaha memahami kelompok masyarakat Yahudi di AS dengan segala pengaruhnya.

⁷ Iwan Hadibroto, dkk., *Perang Afganistan*, Gramedia Pustaka Utama – Jakarta, 2002 hal. 27.

⁸ Emmanuel Todd, *Op.cit.* hal.260.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Perumusan kebijakan luar negeri suatu negara pada hakekatnya selalu didasarkan pada kepentingan nasional atau national interest yang ingin dicapai. Keputusan politik luar negeri yang diambil suatu Negara tidak hanya dipengaruhi oleh situasi eksternal tetapi juga oleh kondisi internal Negara tersebut. Salah satu sumber perumusan politik luar negeri adalah *societal sources* yang mencakup masyarakat, kultur dan budaya politik.⁹

Yahudi merupakan salah satu kelompok masyarakat Amerika yang sangat dominan dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap pengambilan keputusan politik luar negeri Amerika Serikat untuk kawasan Timur Tengah. Hal ini didorong oleh kepentingan kaum yahudi atas kawasan Timur Tengah. Lobby Yahudi (*Jewish Lobby*) menjadi salah satu senjata penting dalam upaya mempengaruhi pengambilan keputusan luar negeri AS di Timur Tengah tersebut.

Untuk lebih mengarah dan memperjelas penulisan mengenai dampak Lobby Yahudi (*Jewish Lobby*) terhadap politik luar negeri AS di Timur Tengah maka penulis hanya membatasi persoalan pada dampak Lobby Yahudi terhadap kebijakan luar negeri AS di Timus Tengah dalam masa pemerintahan George W. Bush.

⁹ James N. Rosenau dalam Anak Agung Banyu Permita dan Yanyan M. Yani, *Pengantar Ilmu HI*, PT Remaja Rosdakarya – Bandung 2005 hal. 57

2. Rumusan Masalah

Dengan meninjau masalah-masalah di atas, maka penulis membuat rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Sejauh mana dampak *Lobby Yahudi* terhadap politik luar negeri AS di Timur Tengah?
- b. Bagaimana dampak kebijakan George W. Bush tersebut terhadap legitimasi politiknya sebagai Presiden?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sejauh mana dampak *Lobby Yahudi (Jewish Lobby)* terhadap politik luar negeri AS di Timur Tengah pada masa pemerintahan George W. Bush
- b. Untuk mengetahui bagaimana dampak kebijakan politik luar negeri AS di Timur Tengah terhadap legitimasi politik George W. Bush.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis dan menjadi masukan penting bagi pengkaji masalah internasional dalam memahami sumber-sumber atau faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan politik luar negeri suatu negara dan dampaknya terhadap pengambilan keputusan politik luar negeri.

- b. Diharapkan dapat menjadi masukan guna mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga dijadikan bahan informasi bagi penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Konseptual

Kedamaian dan ketenteraman adalah hal yang penting untuk kemajuan sebuah negara. Gejolak dan perang akan menimbulkan instabilitas serta menghambat bahkan menghentikan kemajuan dan pembangunan di berbagai bidang. Kekuatan imperialis memahami baik hal ini, dan selalu berusaha menciptakan gejolak antar negara dan menciptakan separah mungkin instabilitas bahkan perang antar negara. Dewasa ini, AS sebagai pemimpin kaum imperialis dan kekuatan adidaya terbesar dunia, menggulirkan politik konfrontatifnya ke seluruh penjuru dunia. Politik AS di Timur Tengah merupakan bukti nyata metode untuk menyulut perpecahan, instabilitas, dan krisis di berbagai kawasan di dunia ini.

AS selalu mendukung setiap tindakan yang di ambil oleh rezim Zionis Israel dan melindunginya dari lembaga-lembaga internasional. Akibatnya, Israel tampil sebagai rezim yang tidak mengindahkan satupun aturan Internasional.

Bagaimanapun juga, kebijakan luar negeri sebuah negara selalu dilandasi oleh kepentingan nasional (*national interest*) negara tersebut. Jack C. Plano dan Roy Olton mengungkapkan :

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan Negara dalam menghadapi negara lain atau unit

politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.¹⁰

Kebijakan politik luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat yang diperintahnya meskipun kepentingan nasional suatu bangsa pada waktu itu ditentukan oleh siapa yang berkuasa pada waktu itu.¹¹

Ada banyak faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan politik luar negeri sebuah negara atau yang menjadi sumber-sumber politik luar negeri sebuah negara. *James N. Rosenau* mengkategorikan sumber-sumber politik luar negeri melalui dua kontinum, yakni dengan cara menempatkan sumber-sumber itu pada kontinu waktu (*time continu*) dan kontinu agregasi sistematik (*systematic agregation continu*).¹² Kontinu waktu meliputi sumber-sumber yang cenderung bersifat mantap dan berlaku terus menerus dan tetap (*sources that tend to change slowly*) dan sumber-sumber yang dapat dipengaruhi oleh fluktuasi jangka pendek (*short-term fluctuations*), dan sumber-sumber yang dapat berubah (*sources that tend to undergo rapid change*).

Sumber-sumber utama yang menjadi input dalam perumusan kebijakan luar negeri, yaitu:

1. Sumber Sistemik (*systemis sources*), merupakan sumber yang berasal dari lingkungan eksternal suatu negara.

¹⁰ *Ibid*, hal. 56

¹¹ Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*, LP3ES – Jakarta, 1994 hal. 184

¹² James N. Rosenau , *Op. cit*, hal. 57

2. Sumber Masyarakat (*societal sources*), yang berasal dari lingkungan internal, mencakup faktor kebudayaan dan sejarah, pembangunan ekonomi, struktur social dan perubahan opini publik.
3. Sumber Pemerintahan (*governmental sources*), merupakan sumber internal yang menjelaskan tentang pertanggung jawaban politik dan struktur dalam pemerintahan.
4. Sumber Idiosinkratik (*idiosyncratic sources*), merupakan sumber internal yang melihat nilai-nilai pengalaman, bakat, serta kepribadian elit politik yang mempengaruhi persepsi, kalkulasi dan perilaku mereka terhadap kebijakan luar negeri.¹³

Dari hal tersebut di atas, dapat dilihat bagaimana determinan domestik sangat berperan dalam mempengaruhi keputusan politik luar negeri satu negara. Lobi politik merupakan salah satu jalan bagi elit atau kelompok tertentu untuk mempengaruhi keputusan politik luar negeri yang ditempuh pemerintah negaranya.

Lobi itu sendiri merupakan sebuah proses yang dijalankan melalui sebuah pendekatan politik dengan tujuan mencapai suatu kesepakatan bersama. Deni Kurniawan As'ari mendefinisikan Lobi sebagai: Proses pendekatan politik yang dilakukan untuk mencapai solusi guna mencapai tujuan atau kesepakatan bersama.¹⁴

Lebih spesifik, Osman Raliby mendefinisikan lobby sebagai ruang berjalan-

¹³ *Ibid* hal 57

¹⁴ Deni Kurniawan As'ari, *Kamus Istilah Politik dan Kewarganegaraan*, Yrama Media – Bandung, 2006

jalan di parlemen atau kamar-kopi. Ia lebih melihatnya sebagai ruang atau tempat, sedang prosesnya disebut “Lobbying” yang berarti, memperoleh dan mengemukakan keterangan-keterangan politik sewaktu dalam berjalan-jalan di ruangan Parlemen atau badan perwakilan lainnya untuk mempengaruhi.¹⁵

Kegiatan saling mempengaruhi dapat saja terjadi dalam, tidak hanya interaksi manusia secara individual, tetapi juga dalam kehidupan ketatanegaraan baik antar elit, antar golongan atau kelompok dalam masyarakat, melainkan juga antar kelompok atau golongan masyarakat tertentu dengan para penentu atau pengambil keputusan (*decision makers*).

Kebijakan luar negeri AS di kawasan Timur Tengah yang senantiasa diwarnai tindak kekerasan, ketidakadilan dan perampasan terhadap hak-hak masyarakat Timur Tengah pada umumnya mengindikasikan adanya pengaruh kelompok masyarakat tertentu dalam hal ini kaum Yahudi terhadap pengambilan keputusan politik luar keputusan politik luar negeri AS di Timur Tengah.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penulis menggunakan tipe penelitian *deskriptif analitis* yaitu menggambarkan dan menguraikan permasalahan atau keadaan dari gejala, peristiwa atau gagasan yang berkembang dengan tujuan agar hasil penggambaran atau penguraian permasalahan dapat ditarik kesimpulan yang bersifat analitis.

¹⁵ Osman Raliby, *Kamus Internasional*, Bulan Bintang – Jakarta, 1982.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *data sekunder* dimana data yang diperoleh, adalah hasil penelitian sebelumnya, yang berkaitan dengan obyek penelitian, dan berbagai referensi dari text book, surat kabar, majalah, jurnal harian, dan situs internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu telaah pustaka, dimana penulis mencari dan mengumpulkan data-data dari sejumlah literature yang relevan dengan pokok permasalahan dalam obyek penelitian baik berupa buku-buku, dokumen, ataupun artikel-artikel yang bersumber dari majalah-majalah, surat kabar, ataupun situs-situs internet. Data tersebut diperoleh dari berbagai sumber yang berhubungan dengan penelitian yang akan penulis lakukan di perpustakaan dan instansi yang terkait, yaitu:

- a. Kantor Departemen Luar Negeri Indonesia di Jakarta
- b. Kantor Kedutaan Besar AS di Jakarta
- c. Perpustakaan Centre For Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta
- d. Perpustakaan Universitas Hasanuddin, Makassar
- e. Perpustakaan Universitas 45, Makassar
- f. Perpustakaan Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu menggambarkan permasalahan berdasarkan fakta-fakta atau keterangan dari berbagai sumber.

G. Rancangan Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian dan analisis data ini akan disusun dalam karya ilmiah (skripsi), dengan rancangan sistematika sebagai berikut:

- Bab pertama, yaitu pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- Bab Kedua, yaitu tinjauan pustaka, berisi penelusuran kepustakaan dan literatur tentang kebijakan luar negeri, lobby yahudi.
- Bab Ketiga, yaitu gambaran umum masalah, berisi tentang praktek Lobby Yahudi di AS dan pemaparan beberapa keputusan politik luar negeri AS di Timur Tengah.
- Bab keempat, yakni hasil penelitian dan pembahasan, berisi pemaparan tentang dampak dari praktek Lobby Yahudi terhadap keputusan politik luar negeri AS di Timur Tengah, dan bagaimana korelasi hal tersebut terhadap menurunnya legitimasi politik George W. Bush.
- Bab kelima, yakni penutup, berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan salah satu elemen penting dalam setiap usaha untuk memahami perilaku sebuah negara terhadap negara lain dalam pergaulan masyarakat internasional. Pada dasarnya, kepentingan nasional menjadi faktor yang mendorong sebuah negara berinteraksi dengan negara lain atau komunitas internasional lain.

Kaum realis memandang kepentingan nasional sebagai sebuah konsep yang berkaitan erat dengan konsep power. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa kepentingan nasional adalah mengejar kekuasaan, yakni apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini bisa diciptakan melalui teknik-teknik paksaan maupun kerjasama.¹⁶ Oleh karena itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Banyu Perwita dan M. Yani, kekuasaan dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup (*survival*) dalam politik internasional.¹⁷

¹⁶ Mohtar Mas' oed, *Op. cit.*, hal. 140

¹⁷ Anak Agung Banyu Permita dan Yanyan M. Yani, *Pengantar Ilmu HI*, PT Remaja Rosdakarya – Bandung 2005 hal. 35

Bagaimanapun juga, setiap negara dituntut untuk mempertahankan hidup serta melindungi identitas fisik, politik dan kulturalnya, dan ini merupakan arti yang minimum dalam konsep kepentingan nasional. Morgenthau, dalam Mas'ood mengungkapkan pandangannya bahwa kemampuan minimum negara-bangsa adalah melindungi identitas fisik, politik, dan kulturalnya dari gangguan negara-bangsa lain. Diterjemahkan dalam pengertian yang lebih spesifik, negara-bangsa harus bisa mempertahankan integritas teritorialnya (yaitu identitas fisiknya); mempertahankan rezim ekonomi-politiknya (yaitu identitas politiknya); yang mungkin saja demokratis, sosialis, atau komunis, dan sebagainya, serta memelihara norma-norma etnis, religius, linguistik, dan sejarahnya (yaitu, identitas kulturalnya).¹⁸

Jika demikian, maka setiap negara tidak dapat menghindar dari kepentingan nasional karena pada akhirnya ia berkaitan erat dengan tujuan-tujuan nasional. Plano dan Olton mengungkapkan:

“Kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi.”¹⁹

Kepentingan nasional, jika merujuk pada pemikiran di atas, merupakan dasar dalam perumusan kebijakan luar negeri suatu negara. Oleh karena itu kepentingan nasional dapat pula dikatakan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan politik luar negeri suatu negara. Kepentingan nasional memuat tujuan-tujuan nasional yang

¹⁸ Mas'ood, *Op.cit.* hal. 141

¹⁹ Banyu Perwita, *Op.cit.*, hal. 35

hendak dicapai suatu negara-bangsa dalam interaksinya dengan negara atau komunitas internasional lainnya dalam arena internasional.

Bagaimanapun juga, setiap negara pasti menghendaki keuntungan dari partisipasinya dalam pergaulan masyarakat internasional. Kepentingan nasional menuntut implementasinya dalam bentuk pelaksanaan kebijakan politik luar negeri. Kepentingan nasional tidak hanya merupakan rumusan tujuan tetapi juga memuat arah atau haluan yang harus dilalui dalam upaya pencapaian tujuan dimaksud. Dan jika demikian maka pada akhirnya dibutuhkan seperangkat evaluasi untuk mengukur sejauh mana kepentingan nasional tersebut telah dicapai.

Joseph Frankel mengklasifikasikan konsep kepentingan nasional ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Aspirasional

Pada tingkat aspirasional, kepentingan nasional dipakai untuk menunjukkan gambaran tentang kehidupan yang baik, serangkaian tujuan ideal, yang kalau mungkin hendak dicapai oleh negara. Jadi, bila konsep tentang kepentingan nasional diajukan pada tingkat aspirasional saja, itu berarti bahwa kebijaksanaan itu tidak sedang dilaksanakan, tetapi menunjukkan garis besar haluan kebijaksanaan tersebut. Kalau ada kesempatan, misalnya karena terjadi peningkatan kemampuan negara, atau terjadi perubahan yang menguntungkan dalam lingkungan eksternal yang dihadapi negara, (atau kombinasi keduanya), maka kebijaksanaan yang aspirasional itu bisa menjadi operasional.

Menurut Frangkel, ada tujuh sifat konsepsi kepentingan nasional pada tingkat aspirasional, yakni:

- Kepentingan nasional itu berjangka panjang
- Berakar dalam sejarah dan ideologi
- Merupakan sumber kritik oleh oposisi terhadap pemerintah tetapi bukan merupakan pusat perhatian pemerintah.
- Memberikan *sence of purpose* (kesadaran akan tujuan) atau harapan terhadap kebijaksanaan
- Tidak perlu diartikulasikan dan dikoordinasikan secara penuh dan bisa saling bertentangan.
- Tidak memerlukan studi kelayakan.
- Lebih ditentukan oleh kehendak politik daripada oleh kemampuan nyata.

2. Operasional

Pada tingkat operasional, kepentingan nasional menunjuk pada keseluruhan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang betul-betul dilaksanakan. Menurut Frankel, ada delapan perbedaan antara konsepsi operasional tentang kepentingan nasional ini dengan konsepsi yang aspirasional, yaitu: kepentingan nasional yang operasional itu berjangka pendek dan bisa dicapai dalam waktu yang tidak terlalu lama; sering muncul dari pertimbangan keharusan atau keperluan; merupakan perhatian utama pemerintah dan partai yang berkuasa; lebih dipergunakan dalam cara yang deskriptif daripada normatif; karena keharusan penerapannya, kontradiksi tidak mudah ditolerir, diterjemahkan ke dalam kebijaksanaan

berdasarkan perhitungan akan prospek keberhasilannya; lebih ditentukan oleh kemampuan untuk melaksanakan daripada oleh kehendak politik; dan kepentingan itu bisa diatur kedalam program-program yang minimum, dimana program maksimum itu mewakili kepentingan nasional pada tingkat aspirasional.

Menurut Frankel, faktor yang paling penting dalam politik luar negeri adalah hubungan timbale balik antara dua tingkatan ini. Hubungan antara tingkat aspirasional dan tingkat operasional ini dipengaruhi oleh sifat dari apa yang oleh Frankel disebut *net achievement capability*, yaitu hubungan antara tujuan, kemampuan dan kendala, yang menentukan apa yang betul-betul dicapai oleh negara dalam lingkungan eksternalnya.

3. Eksplanatori dan Polemik

Pada tingkatan ini, konsep kepentingan nasional dipakai untuk menjelaskan, mengevaluasi, merasionalisasikan dan mengkritik politik luar negeri.²⁰

Amerika Serikat sebagai negara super power pun tidak lepas dari perjuangan terhadap pencapaian kepentingan nasional dalam arena internasional. Amerika senantiasa berupaya mencapai tujuan nasionalnya dalam interaksinya dengan masyarakat internasional. Pelaksanaan politik luar negeri Amerika Serikat diharapkan mampu memainkan perannya untuk bisa mencapai apa yang telah dirumuskan dalam terminologi kepentingan nasional.

Pada dasarnya kepentingan nasional Amerika Serikat di Kawasan Timur Tengah sangat besar. Kepentingan akan energi minyak misalnya, Amerika Serikat

²⁰ Mas'oed, *Op.cit*, hal. 148

sangat tergantung pada suplay minyak dari kawasan Timur Tengah untuk bisa memenuhi kebutuhan minyak dalam negerinya. Amerika saat ini, adalah konsumen terbesar kedua setelah Rusia. Lebih dari 80 miliar barrel minyak dunia disedot oleh negara ini.

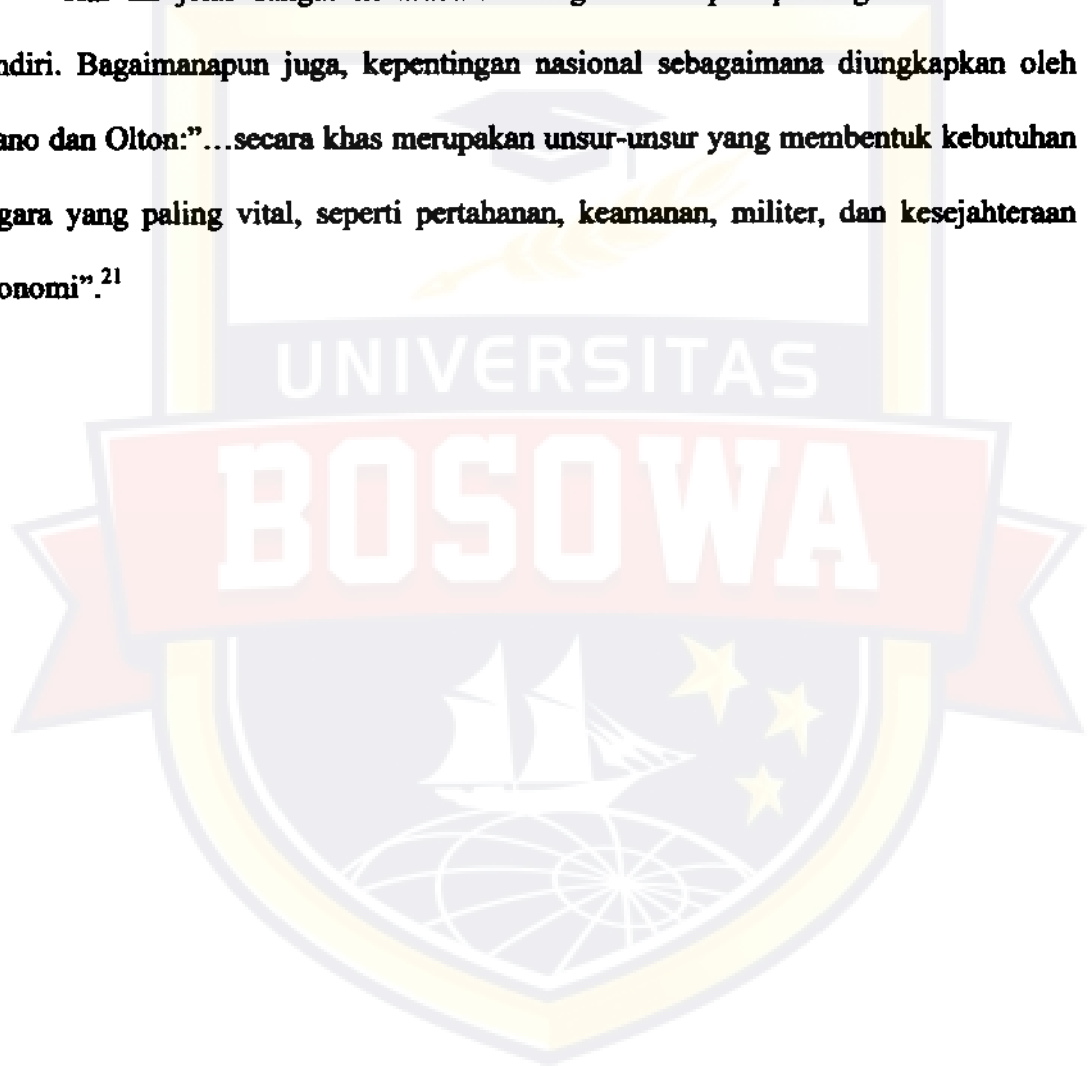
Jika bertolak dari hal tersebut di atas maka seyogyanya kebijakan Amerika Serikat diformulasikan sedemikian rupa untuk bisa melindungi kepentingannya tersebut tapi dalam suatu kerangka kerjasama yang menguntungkan, tidak saja Amerika Serikat, tetapi juga negara-negara Timur Tengah. Akan tetapi, gambaran kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah saat ini bisa menjadi indikator bagaimana Pemerintah AS seakan menempatkan pencapaian kepentingan nasional pada urutan kedua setelah melindungi kepentingan Israel. Ini berarti prioritas kebijakannya adalah melindungi kepentingan negara lain dan bukan kepentingan nasionalnya.

Hal tersebut bukannya tidak berdampak. Fenomena perang oktober 1976 ketika Amerika memilih mendukung Israel bisa menjelaskan hal ini. Dukungan Amerika pada Israel tersebut memicu gerakan embargo minyak negara-negara OPEC. Saat itu, Amerika mengalami resesi hebat karena embargo ini. Kebijakan mendukung Israel membawa Amerika Serikat pada kehancuran secara ekonomi dalam negerinya sendiri.

Kenyataan mengabaikan kepentingan nasionalnya sendiri untuk melindungi kepentingan negara lain sungguh merupakan sebuah pertanyaan besar. Apalagi untuk negara sebesar Amerika Serikat. Bagaimana mungkin sebuah negara seperti Amerika

Serikat memilih untuk mengabaikan kepentingan nasionalnya sendiri yang mana berkaitan dengan pemenuhan salah satu kebutuhan paling vitalnya yakni kebutuhan akan energi minyak dan selanjutnya memilih melindungi kepentingan negara lain?

Hal ini jelas sangat kontradiktif dengan konsep kepentingan nasional itu sendiri. Bagaimanapun juga, kepentingan nasional sebagaimana diungkapkan oleh Plano dan Olton: "...secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi".²¹



²¹ Jack C. Plano dan Roy Olton, Kamus Hubungan Internasional Abardin – Bandung, 1999 hal. 11

B. Konsep Politik Luar Negeri

Politik luar negeri sebuah negara merupakan sarana yang dibutuhkan dalam upaya mengejar kepentingan tertentu. Politik luar negeri bisa dikatakan sebagai instrumen yang dipakai oleh suatu negara dalam upaya pencapaian kepentingan negara tersebut. Jika merujuk pada konsepsi kepentingan nasional maka politik luar negeri itu sendiri merupakan implementasi dari rumusan-rumusan kebijakan yang disusun untuk mencapai tujuan-tujuan nasional. Politik luar negeri memuat serangkaian sikap dan tindakan suatu negara terhadap negara lain.

Plano berpendapat bahwa setiap kebijakan luar negeri dirancang untuk menjangkau tujuan nasional. Tujuan nasional yang hendak dijangkau melalui kebijakan luar negeri merupakan formulasi kongkret dan dirancang dengan mengaitkan kepentingan nasional terhadap situasi internasional yang sedang berlangsung serta power yang dimiliki untuk menjangkaunya. Tujuan dirancang, dipilih, dan ditetapkan oleh pembuat keputusan dan dikendalikan untuk mengubah kebijakan (*revisionist policy*) atau mempertahankan kebijakan (*status quo policy*) ihwal kenegaraan tertentu di lingkungan internasional.²²

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka politik luar negeri mutlak diperlukan dalam percaturan politik internasional. Menurut Banyu Perwita dan M. Yani: “secara umum, politik luar negeri (*foreign policy*) merupakan seperangkat formula nilai,

²² *ibid* hal. 51

sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional.”²³

Kendati demikian, memahami politik luar negeri bukan merupakan suatu hal yang mudah. Hal ini mengingat kompleksitas masalah serta variabel yang mempengaruhi perumusan politik luar negeri, termasuk di dalamnya, lingkungan internal serta lingkungan eksternal.

James N. Rosenau mengungkapkan:

“Dalam kajian politik luar negeri sebagai suatu sistem, rangsangan dari lingkungan eksternal dan domestik sebagai input yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara dipersepsikan oleh para pembuat keputusan dalam suatu proses konversi menjadi output. Proses konversi yang terjadi dalam perumusan politik luar negeri suatu negara ini mengacu pada pemaknaan situasi, baik yang berlangsung dalam situasi eksternal maupun internal dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai serta sarana dan kapabilitas yang dimilikinya.”²⁴

Sementara itu, dalam pandangan K.J. Holsti, lingkup kebijakan luar negeri meliputi semua tindakan serta aktivitas negara terhadap lingkungan eksternalnya dalam upaya memperoleh keuntungan dari lingkungan tersebut, serta hirau akan berbagai kondisi internal yang menopang formulasi tindakan tersebut.²⁵

Dari uraian di atas, secara umum, politik luar negeri selalu dipengaruhi oleh determinan domestik dan determinan eksternal dalam hal ini lingkungan internasional. Kedua hal ini memainkan peran sebagai masukan bagi para pembuat keputusan politik luar negeri dalam penyusunan kebijakan luar negerinya. Hal ini

²³ Banyu Perwita, *Op. cit.*, hal. 47

²⁴ *Ibid.* hal. 49

²⁵ K.J. Holsti, *Politik Internasional: suatu kerangka analisis*, Bina Cipta – Bandung, 1992 hal. 21

Pada fase ini rencana tindakan politik luar negeri ini akan memberikan pedoman bagi :

- Tindakan yang ditujukan pada situasi yang berlangsung lama, misalnya kebijakan luar negeri yang berkenaan dengan konflik Arab-Israel.
- Tindakan yang ditujukan pada negara-negara tertentu.
- Tindakan yang ditujukan pada berbagai sasaran lainnya.

3. Kebijakan luar negeri sebagai bentuk perilaku atau aksi (*as a form of behaviour*).

Pada tingkat ini kebijakan luar negeri berada dalam tingkat yang lebih empiris, yaitu berupa langkah-langkah nyata diambil para pembuat keputusan yang berhubungan dengan kejadian serta situasi di lingkungan eksternal. Langkah-langkah tersebut dilakukan berdasarkan orientasi umum yang dianut serta dikembangkan berdasarkan komitmen dan sasaran yang lebih spesifik.²⁶

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya kebijakan luar negeri juga dipengaruhi oleh determinan eksternal dalam hal ini lingkungan internasional. Ketiga konsep yang ditawarkan Rosenau di atas bisa dipakai untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara suatu negara dengan kejadian dan situasi di luar negaranya.

²⁶ Banyu Perwita, *Op.cit*, hal. 53

Selain itu, sebagaimana telah diutarakan bahwa tidak hanya determinan eksternal yang mempengaruhi politik luar negeri sebuah negara melainkan juga determinan domestik.

Pada dasarnya, determinan domestik merujuk pada keadaan atau situasi dalam negeri. Howard Lentner dalam Banyu Perwita dan M.Yani membagi determinan domestik tersebut kedalam tiga kategori berdasarkan waktu untuk berubah, yakni:

1. *Highly stable determinants*; terdiri atas luas geografi, lokasi, bentuk daratan, iklim, populasi, serta sumber daya alam.
2. *Moderately stable determinants*; terdiri atas gaya politik, kepemimpinan politik, dan proses politik.
3. *Unstable determinants*; yaitu sikap dan persepsi jangka panjang serta faktor-faktor ketidaksengajaan.²⁷

Selain kategori di atas, William Coplin menekankan peranan politik dalam negeri dalam penyusunan politik luar negeri suatu negara. Secara lebih spesifik, Coplin menyetengahkan pandangannya tentang sistem pengaruh kebijakan (*policy influence system*). Menurut Coplin, sistem pengaruh kebijakan (*policy influence system*) negara manapun merupakan serangkaian hubungan timbal balik yang sangat

²⁷ *Ibid*, hal.56

kompleks antara pengambil keputusan dengan *policy influencer* (yang mempengaruhi kebijakan) nya.²⁸

Dalam kaitan dengan peran politik dalam negeri dalam penyusunan politik luar negeri, Coplin membedakan empat tipe *policy influencers* yakni:

1. Birokrat yang mempengaruhi

Salah satu tipe *policy influencers* yang ada di setiap Negara modern adalah *bureaucratic influencer* (birokrat yang mempengaruhi). Peranan *bureaucratic influencer* dalam proses penyusunan politik luar negeri, baik dalam system politik terbuka maupun tertutup tidak jauh berbeda. Dalam kedua tipe sistem politik ini, kelompok-kelompok birokratis sering beroperasi dibelakang layar melalui pemberian informasi untuk mengambil keputusan serta digunakan sebagai instrumen bagi pelaksanaan keputusan itu. Pengaruh dalam proses pengambilan keputusan ditentukan oleh tingkat kepercayaan kelompok-kelompok birokratis itu kepada para pemimpin puncak.

2. Partai yang mempengaruhi

Tipe *policy influencers* kedua adalah partai-partai politik. Coplin menyebutnya sebagai *Partisan influencers* (partai yang mempengaruhi). Influencers ini bertujuan menerjemahkan tuntutan-tuntutan masyarakat menjadi tuntutan-tuntutan politis, yaitu tuntutan-tuntutan kepada para pengambil keputusan yang menyangkut kebijakan-kebijakan pemerintah. *Partisan influencers* bisa

²⁸ William Coplin, *Pengantar Politik Internasional*, Alih bahasa M. Marbun, sinar baru – Bandung, 2003 hal. 75

dipandang sebagai informasi dua arah dan mempengaruhi saluran di antara para pengambil keputusan resmi dan anggota masyarakat. Coplin mengakui kalau peran partisan influencers dalam negara dengan sistem politik terbuka agak terbatas. Terutama dalam negara yang sistem demokrasinya stabil.

3. Kepentingan yang mempengaruhi

Tipe *policy influencers* ketiga adalah *interest influencers* (kepentingan yang mempengaruhi), terdiri atas sekelompok orang yang bergabung bersama melalui serangkaian kepentingan yang sama, yang belum cukup luas untuk bisa menjadi dasar bagi aktivitas kelompok partai, namun sangat dibutuhkan untuk menyerahkan sumber-sumber untuk mendapatkan dukungan dari *policy influencer* atau pengambil keputusan lain. Kebanyakan kepentingan ini bersifat ekonomis. Kepentingan yang bersifat ekonomis, menurut Coplin, juga bisa digunakan sebagai dasar bagi tindakan kolektif, terutama apabila ada ikatan-ikatan etnis atau geografis diantara mereka. Sifat dan taktik *interest influencers* berbeda untuk kedua tipe sistem politik. Dalam negara dengan sistem politik tertutup, *interest influencers* harus mengejar kepentingan mereka di belakang layar. *interest influencers* tidak bisa mengejar kepentingan mereka secara terbuka. Lain halnya pada negara dengan sistem politik terbuka. Dalam sistem politik ini, *interest influencers* memainkan peran yang lebih besar. Menurut Coplin, karena kelompok-kelompok itu kadang-kadang memiliki sumber-sumber finansial yang besar, mereka berhasil mempengaruhi para pemilih serta *partisan influencers*. Coplin mencontohkan tipe *policy influencers* ini dengan organisasi kaum zionis

yang berperan dalam mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Israel.

4. Massa yang mempengaruhi

Tipe *policy influencers* yang terakhir ini adalah opini publik atau *mass influencers* (massa yang mempengaruhi). Dalam hal ini mengacu pada iklim opini, yang dimiliki oleh populasi yang dipertimbangkan oleh para pengambil keputusan pada saat menyusun politik luar negeri. Menurut Coplin, dampak sikap *mass influencers* bagi pengambil keputusan luar negeri sangat beraneka ragam, sesuai dengan tipe sistem politiknya.²⁹

Gambaran tentang konsepsi politik luar negeri di atas memberikan pemahaman tentang kompleksitas permasalahan yang ada dalam penyusunan kebijakan luar negeri sebuah negara. Para pengambil keputusan dituntut untuk sebisa mungkin menganalisa situasi, baik internal maupun eksternal, untuk bisa dijadikan pertimbangan dalam penyusunan politik luar negerinya. Hal ini tentu dengan tetap berdasar pada rumusan tujuan nasional yang termuat dalam konsep kepentingan nasional.

Politik luar negeri Amerika Serikat terhadap negara-negara di kawasan Timur Tengah mengindikasikan besarnya peran politik dalam negeri terhadap pengambilan keputusan politik luar negeri Amerika Serikat. Kelompok, yang oleh Coplan disebut sebagai *interest influencers* sangat berperan besar dalam usaha mempengaruhi

²⁹ *Ibid*, hal.82-88

keputusan politik luar negeri Amerika Serikat terhadap negara-negara di kawasan Timur Tengah.

Kelompok *interest influencers* dalam percaturan politik dalam negeri Amerika Serikat sangat banyak. Akan tetapi, terkait kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah, secara khusus difokuskan pada kelompok lobi Yahudi mengingat besarnya kepentingan kelompok ini dan pengaruhnya di tubuh para pengambil keputusan politik luar negeri di Amerika Serikat.

George F. Kennan, seorang diplomat, sejarawan, dan analis politik luar negeri Amerika Serikat, dalam memoarnya menguraikan salah satu dari pelajaran-pelajaran pertama yang diperolehnya tentang politik luar negeri Amerika:

“...Kecenderungan untuk membuat pernyataan serta mengambil tindakan yang pertimbangannya bukanlah pengaruhnya terhadap lingkungan internasional, padahal sebenarnya itulah tujuannya, melainkan efeknya terhadap formasi opini eselon-eselon Amerika, terutama opini kongres, yang sangat dikhawatirkan oleh para negarawan Amerika. dalam hal ini, masalahnya bukanlah: sejauh mana keefektifan yang saya kerjakan, dalam arti dampaknya terhadap lingkungan dunia? Melainkan adalah: bagaimana tanpaknya saya dalam cermin opini dalam negeri Amerika, apabila saya melakukannya? Apakah saya terlihat tekun, lihai, sangat patriotis, serta memiliki kewaspadaan yang tinggi terhadap tipu muslihat negara-negara lain? Jika benar demikian, itulah yang saya lakukan kendati ternyata kurang bermakna, atau bahkan tidak produktif apabila diterapkan ke dalam realitas situasi eksternal”.³⁰

³⁰ *Ibid*, hal. 73

C. Pengertian Lobi Yahudi (Jewish Lobby)

1 Pengertian Lobi

Dalam pengertian yang paling mendasar, lobi merupakan tindakan yang wajar atau sah-sah saja untuk dilakukan. Apalagi untuk negara-negara yang menganut sistem demokrasi, dimungkinkan setiap individu ataupun kelompok untuk melakukan lobi sepanjang tindakan tersebut tidak merugikan siapapun terlebih negara.

Menurut J.S Badudu, dalam Kamus kata-kata serapan asing dalam bahasa Indonesia, Lobi adalah:

- ✓ Gang tempat berjalan-jalan di gedung parlemen, dsb.
- ✓ Kamar kopi

Sedang melobi, menurutnya adalah: "mencari kesepakatan secara tidak resmi msl ketika berjalan-jalan atau duduk-duduk di lobi (anggota-anggota Parlemen) tentang masalah-masalah politik."³¹

Lobi itu sendiri merupakan sebuah proses yang dijalankan melalui sebuah pendekatan politik dengan tujuan mencapai suatu kesepakatan bersama. Deni Kurniawan As'ari mendefinisikan Lobi sebagai: "Proses pendekatan politik yang dilakukan untuk mencapai solusi guna mencapai tujuan atau kesepakatan bersama."³²

Osman Raliby mendefinisikan lobby sebagai : "ruang berjalan-jalan di parlemen atau kamar-kopi. Ia lebih melihatnya sebagai ruang atau tempat, sedang

³¹ J.S. Badudu, *Kamus Kata-Kata Serapan dalam Bahasa Indonesia*

³² Deni Kurniawan As'ari, *Kamus Istilah Politik dan Kewarganegaraan*, Yrama Media – Bandung, 2006

prosesnya disebut “Lobbying” yang berarti, memperoleh dan mengemukakan keterangan-keterangan politik sewaktu dalam berjalan-jalan di ruangan Parlemen atau badan perwakilan lainnya untuk mempengaruhi.³³

Dalam kaitan dengan tulisan ini, Lobi lebih ditekankan pada kelompok atau organisasi kaum Yahudi yang mencari kesepakatan-kesepakatan politik secara tidak resmi, misalnya, dengan anggota parlemen atau para pengambil keputusan.

Menurut C. Gunawan, Lobi Yahudi merupakan organisasi yang bekerja untuk mempengaruhi para pejabat dan pihak pemerintahan AS untuk mendukung kebijakan Israel.³⁴

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa lobi Yahudi adalah tindakan atau usaha yang dijalankan oleh kelompok atau organisasi kaum Yahudi dalam upaya untuk mempengaruhi atau mencari kesepakatan-kesepakatan politik secara tidak resmi dengan para pengambil keputusan dalam tubuh Pemerintahan Amerika Serikat untuk mendukung kebijakan Israel atau kebijakan yang pro Israel.

Kelompok-kelompok lobi Yahudi di Amerika Serikat saat ini sangat banyak yakni: ADL (Anti - Defamation League), JDL (Jewish Defense League), RJC (Republican Jewish Coalition), The Israel Project, dan CFR (Council for Foreign Relations). Selain itu, ada juga Organisasi Perempuan Zionis , Komite Yahudi Amerika (AJC). Beberapa organisasi di atas bernaung di bawah American Israel

³³ Osman Raliby, *Kamus Internasional*, Bulan Bintang – Jakarta, 1982.

³⁴ <http://www.mail-archive.com/tamanbintang@yahoogroups.com/msg00317.html>, diakses pada

Jumat, 13 Januari 2006 - 08:57:15 WIB

Public Affairs Committee (AIPAC), organisasi lobi Yahudi yang disebut-sebut sebagai kelompok lobi terkuat kedua di AS.



BAB III

GAMBARAN UMUM MASALAH

A. Pemikiran dan Praktek Lobby Yahudi di AS

Peranan lobi yahudi dalam pentas politik di AS sesungguhnya bukan merupakan sebuah fenomena baru. Sejak migrasi Yahudi Eropa ke Amerika pada abad ke-17, mereka tidak membutuhkan waktu yang lama untuk memegang kendali Pemerintahan di AS. Munculnya ide Theodore Herzl tentang zionisme politik, kaum Yahudi di AS menunjukkan dukungan yang luar biasa. Mereka memanfaatkan pengaruh Yahudi di AS untuk membantu Zionisme. Yahudi AS beberapa kali menjadi tuan rumah penyelenggaraan konferensi zionisme dunia. Inggris sebagai negara imperialis besar di zaman itu, ikut memberikan bantuan kepada Zionis. Dengan menipu dan terkadang menekan para pemimpin Arab, Inggris membuka jalan bagi orang-orang Yahudi untuk hijrah ke Palestina.

Selama menjajah Palestina, koloni Inggris sengaja memanfaatkan orang-orang Yahudi ekstrem untuk membantu menumpas gerakan perlawanan rakyat Paletina. Lambat laun, Yahudi Zionis di Palestina semakin kuat dan mereka juga telah memiliki barisan tentara. Tahun 1948, sehari setelah Inggris keluar dari Palestina, orang-orang Zionis mengumumkan berdirinya negara Yahudi di sana yang mereka namakan Israel. Berdirinya rezim ilegal ini juga dibarengi dengan pembantaian massal dan pengusiran rakyat Palestina dari negeri mereka.

Yang jelas, Yahudi sebagai agama tentu tidak menghalalkan praktik-praktik yang dijalankan Zionis. Karena itu bisa dikatakan bahwa Zionisme adalah ide yang didukung oleh orang-orang Yahudi ekstrem yang mengemas kepentingan dunia dengan kedok agama. Yahudi yang memiliki pengaruh kuat di AS, umumnya berasal dari kelompok ekstrem dan Zionis yang ikut membidani kelahiran rezim Israel. Mereka yang lazim disebut lobby Yahudi Zionis adalah kelompok yang sejak kelahiran Amerika Serikat telah memegang kendali di negara itu.

Ada kelompok-kelompok lobi Yahudi di AS, di antaranya adalah:

1. ADL (*Anti-Defamation League*).
2. JDL (*Jewish Defense League*).
3. RJC (*Republican Jewish Coalition*).
4. The Israel Project, dan CFR (*Council for Foreign Relations*).
5. AIPAC (*American Israel Public Affairs Committee*), dll

Para politikus dan analis politik seperti Douglas Feith, Paul Wolfowitz, Richard Perle, Daniel Pipes, Henry Kissinger, Eliot Abrams, dan William Cohen, adalah bagian dari jaringan mereka.

Akan tetapi, dari sekian kelompok lobi yahudi tersebut, kelompok lobi yang paling berpengaruh adalah AIPAC (*American Israel Public Affairs Committee*). Seperti yang di ungkapkan Findley: "...di antara begitu banyak kelompok pro Israel, tidak ada yang diorganisasi lebih baik, lebih aktif atau lebih kuat di banding AIPAC, Komite Urusan Publik Israel-Amerika, lobi utama yang mendukung Israel di

Amerika Serikat sejak 1951.”³⁵ Lobi ini semula bernama Dewan Zionis Amerika untuk Urusan Publik, tetapi kemudian pada tahun 1959 di ubah menjadi AIPAC.

AIPAC (*American Israel Public Affairs Committee*) adalah nama kelompok lobi Yahudi yang sangat kuat. AIPAC bergerilya dalam tatanan politik tingkat tinggi di AS dan memiliki akses yang sangat mudah ke tingkat-tingkat pemerintahan tertinggi di AS. AIPAC didirikan pada tahun 1951 dengan nama Dewan Zionis Amerika untuk Urusan Publik dan pada tahun 1959 berganti menjadi AIPAC. Dengan keanggotaan yang mencapai 65.000 orang di 50 negara bagian, AIPAC dengan mudah mempertahankan pengaruhnya dikalangan pemerintahan AS. Di dalam AIPAC, bernaung sekitar 52 lembaga bertaraf nasional yang separuhnya berafiliasi langsung dengan Israel.³⁶

Misa utama AIPAC adalah mendukung kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah dan memperkuat relasi AS-Israel. Dalam perjalanan, AIPAC tidak sebatas pada memberi dukungan terhadap kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah, melainkan lebih dari itu, AIPAC telah menjelma menjadi kekuatan utama dalam penyusunan kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah. Bahkan lebih jauh,

³⁵ Paul Findley, *Diplomasi Munafik Ala Yahudi*, terjemahan Rahmani Astuti, Penerbit Mizan – Bandung 1995, hal. 145

³⁶ *Ibid*

seperti yang di laporkan *New York Times* pada tahun 1987 dalam Findley:

“AIPAC telah menjadi kekuatan utama dalam menyusun kebijaksanaan Amerika Serikat di Timur Tengah... Organisasi ini telah meraih kekuasaan untuk mempengaruhi pemilihan kandidat presiden, menghalangi praktis setiap penjualan senjata ke sebuah Negara Arab dan bertindak sebagai katalisator bagi hubungan militer yang erat antara Pentagon dan angkatan bersenjata Israel. Para pejabat puncaknya dimintai nasehat oleh kementerian luar negeri dan para penyusun kebijaksanaan Gedung Putih, para senator, dan jenderal.”³⁷

Kenyataan di atas sepintas dapat memberikan gambaran betapa AIPAC sebagai sebuah organisasi lobi pro Israel sangat berperan terhadap setiap penyusunan kebijakan AS terkait persoalan Timur Tengah dan baik Pemerintah AS maupun kongresnya tidak mampu untuk melepaskan diri dari kenyataan tersebut. Hal ini karena terdapat banyak fakta yang menunjukkan bahwa mayoritas anggota kongres, maupun elite di Gedung Putih awalnya berhasil mendapatkan kekuasaannya berkat dukungan politik yang diberikan AIPAC.

Lobi Yahudi di Kongres Amerika Serikat

Kelompok-kelompok Lobi Yahudi seperti AIPAC memainkan pengaruh yang cukup besar di tingkatan Kongres Amerika Serikat. Hal ini penting mengingat besarnya kepentingan mereka dalam setiap kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Timur Tengah. AIPAC, misalnya, telah berhasil menempatkan dirinya sebagai lobi kunci di Kongres.

³⁷ *Ibid*, hal. 146

Pengaruh AIPAC di Kongres AS seolah telah mengakar. Hal ini disebabkan oleh keberhasilan mereka dalam memenangkan para kandidat anggota Kongres yang berkomitmen untuk mendukung setiap agenda mereka. John Mearsheimer dan Stephen Walt mengungkapkan:

“AIPAC sendiri, bagaimanapun, adalah inti dari pengaruh lobi Israel di kongres. Keberhasilannya disebabkan kemampuannya menghargai (dalam bentuk uang, suara dukungan, publikasi) para calon anggota legislatif dan kongres yang mendukung agenda mereka dan juga menghukum siapapun yang menghalanginya.”³⁸

Pengaruh AIPAC semacam ini bukan merupakan hal yang baru. Pelopor AIPAC, Komite Zionis Amerika untuk Urusan Publik bahkan sudah mulai mempraktekannya pada pemilihan Dewan dan Senat tahun 1954 sebagaimana yang dikutip Findley dari New York Times: “satu-satunya pertanyaan yang diajukan pada setiap kandidat adalah pandangannya terhadap Israel dan Timur Tengah. Hal itu seterusnya menjadi satu-satunya kriteria untuk menentukan sikap AIPAC terhadap kandidat tersebut.”³⁹

Findley menjelaskan, keberhasilan AIPAC begitu mengagumkan dalam membantu para pendukung kuat Israel untuk dapat dipilih menjadi anggota kongres.

³⁸ John Mearsheimer dan Stephen Walt, *The Israel Lobi and US Foreign Policy*, terjemahan R.Hidayat, Penerbit Kalam Indonesia – Jakarta.2007 hal. 40

³⁹Paul Findley, *Op.cit*, hal. 159

Menurutnya, meskipun AIPAC secara hukum tidak boleh memberikan uang pada para kandidat, banyak komite aksi politik pro Israel yang bertindak berdasarkan rating kandidat AIPAC dan menyalurkan dana mereka sesuai dengan itu.

Dalam artikelnya yang berjudul *The Israel Lobby and US Foreign Policy*, John Mearsheimer dan Stephen Walt mengetengahkan dua strategi ampuh yang dijalankan oleh kelompok lobi Israel ini yakni: pertama, mereka menggunakan pengaruh luar biasa mereka di Washington, menekan Kongres AS atau jajaran eksekutif pemerintah. Apapun pandangan legislatif atau eksekutif, lobi Israel selalu mencoba untuk membuat dukungan dengan cara yang cerdas. Kedua, Lobi Israel berusaha keras agar publik selalu menilai positif posisi Israel, dengan mengulang-ulang mitos tentang pendirian negara tersebut, dan mempromosikan pendapat-pendapat mereka dalam debat publik. Tujuannya adalah mencegah komentar-komentar kritis muncul di arena politik. Dan menurut mereka, pilar kunci dari efektivitas lobi Israel adalah pengaruhnya di Kongres AS, dimana Israel teramat jelas kebal terhadap kritik.⁴⁰

Bagaimanapun juga, pengaruh AIPAC sebagai salah satu lobi kunci Israel di Capitol Hill sudah mengakar. Setidaknya hal itu di akui Douglas Bloomfield, mantan anggota AIPAC: "adalah hal yang biasa bagi anggota Kongres dan staf-staf mereka mengontak AIPAC pertama kali ketika mereka memerlukan informasi, sebelum

⁴⁰ John Mearsheimer dan Stephen Walt, *Op.cit*, hal. 39

mereka menuju perpustakaan Kongres, ke badan risetnya, ke staf komite atau ke pakar-pakar pemerintahan.”⁴¹ Jika demikian, dampaknya akan sangat jelas, informasi yang disediakan adalah informasi yang menguntungkan bagi mereka.

Tidak hanya sampai di situ, masih menurut Bloomfield, bahwa AIPAC kerap dipanggil untuk menyusun rancangan pidato-pidato, menggarap undang-undang, memberi nasihat tentang taktik, melakukan riset, mengumpulkan penyokong dana dan menganjurkan rakyat memilih tokoh-tokoh yang selama ini didukung.

Melihat hal tersebut di atas, akan menjadi sangat sulit bagi Kongres AS untuk bisa keluar dari pengaruh kelompok-kelompok lobi pro Israel dan dengan demikian maka Kongres hampir pasti akan selalu mendukung setiap kebijakan pemerintah AS terhadap Timur Tengah ketika kebijakan itu menguntungkan bagi Israel. Sebaliknya, Kongres AS mengabaikan dampak dari kebijakan tersebut baik terhadap Timur tengah secara keseluruhan, dunia, bahkan terhadap Amerika Serikat sendiri.

Dengan demikian, akan menjadi sangat mudah bagi kelompok-kelompok lobi Yahudi seperti AIPAC untuk menjalankan agenda-agenda politiknya karena salah satu dari cabang pemerintahan dalam hal ini Kongres AS berhasil mereka kuasai. AIPAC, misalnya, dalam salah satu program kerjanya, menyiapkan lima sampai enam anggotanya untuk mengawal seorang anggota kongres atau seorang senator. Tidak hanya bertugas melakukan lobi, para pengawal yang dikirim AIPAC itu, harus

⁴¹ *Ibid*, hal. 42

mampu menjadwalkan setiap anggota Kongres yang dikawalinya untuk berkunjung ke Israel satu sampai dua kali dalam setahun.

Sehubungan dengan AIPAC dan pengaruhnya di Kongres AS, Mearsheimer dan Stephen Walt mengungkapkan: “Yang paling mendasar adalah bahwa AIPAC secara *de facto* merupakan agen dari sebuah pemerintahan asing, yang mempunyai cengkraman kuat pada Kongres, dengan membuat kebijakan AS terhadap Israel tak bisa diperdebatkan disana meskipun kebijakan itu berdampak luar biasa bagi seluruh dunia.”⁴² Hampir senada dengan itu, Ernest Holings, mantan senator partai Demokrat mengungkapkan: “Kamu tidak dapat mempunyai kebijakan berbeda dari apa yang diinginkan AIPAC di tempat ini.”⁴³

Lobi Yahudi di Gedung Putih

Praktek lobi Yahudi sudah begitu mengakar dalam tatanan pemerintahan Amerika Serikat. Selain di Kongres, pengaruh Lobi Yahudi juga sangat besar di Gedung Putih. Selama pemerintahan Clinton, misalnya, kebijakan terhadap Timur Tengah umumnya ditentukan oleh pejabat-pejabat yang memiliki hubungan dekat dengan Israel atau dengan tokoh-tokoh terkemuka organisasi pro Israel.

⁴²*Ibid*, hal. 42

⁴³*Ibid*, hal. 43

Kondisi ini menjadi semakin sulit ketika Pemerintahan Amerika Serikat dibawah kendali Presiden George W. Bush. Hal ini karena komposisi pemerintahan Bush dikelilingi oleh barisan pembelah gigih Israel. Elliot Abrams, John Bolton, Douglas Feith, Lewis Libby, Richard Perle, Paul Wolfowitz, David Wurmser, dan masih banyak lagi nama lainnya merupakan anggota lobi Israel dan berada satu tim dalam pemerintahan Bush.

Komposisi kabinet Bush ditempati oleh tidak kurang dari 21 orang yang memiliki hubungan kuat dengan Israel. Ini mengindikasikan kalau Pemerintahan Bush telah benar-benar dikuasai oleh kelompok Pro Israel. Penyebab hal ini bisa dengan mudah di tebak. Jika melihat pada perolehan suara ketika pemilihan Presiden tahun 2001, lebih dari 20% suara yang berhasil dimenangkan oleh Bush adalah pemilih Yahudi Amerika.

Selain perolehan suara di atas, juga dilaporkan bahwa pada pemilihan umum tahun 2000 dan 2004, ada 50 anggota AIPAC yang masing-masing memberikan donasi sebesar 72.000 dolar Amerika. Dan yang lebih penting, dari donator tersebut, satu di antaranya adalah penyumbang terbesar baik untuk Presiden Bush maupun untuk rivalnya pada periode lalu, John Kerry.⁴⁴

Kenyataan di atas menggambarkan bagaimana Lobi Yahudi akan dengan sangat mudah mempengaruhi keputusan-keputusan politik Amerika terutama yang

⁴⁴ Herry Nurdi, *Lobi Zionis dan Rezim Bush*, Penerbit Hikmah – Jakarta 2006, hal. 217

berkenaan dengan Israel pada khususnya dan Timur Tengah pada umumnya. Hasilnya, pemerintah Amerika Serikat akan selalu mendukung Israel dalam setiap kebijakan mereka.

Lobi Israel juga sangat berpengaruh di dalam lembaga-lembaga *think tank* Amerika yang menyuplai berbagai saran dan nasihat politik ke Gedung Putih. Bahkan, kelompok lobi ini juga mendirikan lembaganya sendiri. Lembaga-lembaga tersebut antara lain, WINEP, Brookings institutions, Center for Security Policy, Foreign policy Research Institute, dll.⁴⁵

Tidak hanya pada tatanan Pemerintahan, lobi yahudi juga memainkan peran pada aspek-aspek yang lain. Misalnya pengaruh lobi yahudi pada media massa di AS. Asumsinya adalah posisi media yang dapat dipakai untuk bisa menggiring opini publik agar tidak mempertanyakan kebijakan pemerintahnya. Sudut pandang lobi mendominasi media-media utama. Akibatnya, media yang seharusnya menjadi mekanisme kontrolpun terlibat mendukung Israel.

ADL (*Anti Defamation League*) pada tahun 2000 pernah melakukan survei atas editorial media-media ternama di AS, dan hasilnya, 69 media menulis editorial dengan sikap mendukung Israel, dan hanya tujuh Koran saja yang mendukung rakyat Palestina. 19 dari surat kabar yang disurvei mendukung Israel secara terang-terangan

⁴⁵ John Mearsheimer dan Stephen Walt, *Op.cit.* hal. 51

dalam kebijakannya da 17 lainnya mendukung dalam tulisan yang samar.⁴⁶

AIPAC, misalnya, bahkan memiliki 61 daftar nama para kolumnis Amerika yang kritis terhadap Israel dan membuat black list nama-nama tersebut agar media tidak memuat tulisan atau opininya. Lobi Israel juga mampu mengorganisasi penulisan surat protes, demonstrasi dan boikot media-media yang kedapatan menyajikan tulisan anti Israel.

Berhubungan dengan hal itu, Herry Nurdi mengemukakan salah satu contoh kasus yang terjadi pada Mei 2003 dimana sebuah organisasi pro Israel, yakni Committee for Accurate Middle East Reporting (CAMERA) secara serentak dalam sehari mendemo jaringan Nasional Public Radio di 33 kota di seluruh Amerika. Menurutnya, tak jarang mereka menggunakan penekanan finansial seperti yang dialami oleh jaringan kantor berita NPR yang kehilangan potensi iklan satu juta dolar karena klien-klien iklan mereka menarik diri sebelum berita NPR berpihak pada Israel.

Lobi Israel juga telah menyusup hingga ke dunia kampus di AS. Dalam artikelnya, Mearsheimer dan Stephen Walt mengungkapkan lobi Israel telah bertindak untuk mengambil alih kampus-kampus. Menurut mereka, kelompok-kelompok yang baru bermunculan seperti Caravan for Democracy bertugas membawa pembicara-pembicara asal Israel ke Perguruan-perguruan tinggi AS. Ada juga, Jewish

⁴⁶ Herry Nurdi, *Op.cit*, hal. 72

Council for Public Affairs dan the Israel on Campus Coalition yang memiliki agenda merebut kampus di Amerika. Selain itu, lobi Israel juga memonitor apa yang ditulis dan diajarkan oleh para professor dan tidak jarang memblack list mereka yang berseberangan dengan Israel.

Pada September 2002, misalnya, Martin Kramer dan Daniel Pipes, dua pendukung neo-konservatif yang duduk dalam pemerintahan Bush, membangun sebuah situs *Campus Watch*. Tujuan lembaga ini adalah mengawasi akademisi yang dicurigai punya kecenderungan mengkritik Israel di dalam aktivitas mereka. Campus Watch telah mengeliminasi lusinan professor dan dan pengajar dari berbagai universitas ternama di Amerika. Campus Watch juga meminta agar mahasiswa melaporkan aktivitas anti Israel atau antisemit yang terjadi di kampus mereka.⁴⁷

Kenyataan ini semakin menegaskan bahwa lobi Yahudi telah benar-benar menyusup hampir di setiap sendi kehidupan bernegara di Amerika Serikat. Bagaimana bisa sebuah negara berpikir untuk kepentingan negaranya kalau semua sendi kehidupan bernegaranya telah dikuasai oleh organisasi lobi yang bekerja untuk kepentingan negara lain.

Amerika Serikat sebagai sebuah negara adikuasa bahkan dalam negaranya telah dijajah oleh kelompok-kelompok lobi pro Israel. Indikasinya adalah aktivitas lobi pro Israel tersebut dan ketidakberdayaan Amerika Serikat untuk bisa lepas dari

⁴⁷*Ibid*, hal. 90

jeratan lobi tersebut. Untuk bisa memahami lebih jauh tentang aktivitas lobi dan pengaruhnya dalam masa pemerintahan George W. Bush, selanjutnya akan dibahas beberapa kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah era pemerintahan Bush.

B. Kebijakan Politik Luar Negeri Pemerintahan George W. Bush di Timur Tengah

Kebijakan politik luar negeri pada masa pemerintahan George W. Bush selalu diwarnai dengan dukungan penuh terhadap Israel. Kebijakan politik luar negeri AS di Timur Tengah yang dipusatkan pada hubungannya dengan Israel ini telah berlangsung jauh sebelum Bush tampil sebagai Presiden di Amerika Serikat.

Pemerintah AS memberikan bantuan ekonomi dan militer secara konsisten kepada Israel sejak tahun 1976. Israel menerima kira-kira 3 triliun dolar AS bantuan langsung setiap tahun. Dan ini merupakan yang terbesar diantara penerima bantuan luar negeri AS. Israel, oleh pemerintah AS diijinkan untuk menggunakan kira-kira 25 persen dari bantuan yang dialokasikan untuk mensubsidi industri pertahanannya sendiri.

Ketika Pemerintahan Amerika Serikat dibawah kendali Presiden George W. Bush, kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah tidak berubah. Beberapa kebijakan Bush di bawah ini akan menggambarkan keberpihakan pemerintahan Bush terhadap Israel, antara lain:

1. Dukungan terhadap Israel

Banyak analis politik maupun ilmuwan mulai mempertanyakan sikap Amerika yang terus memilih untuk mendukung Israel. Menurut mereka, sejauh ini belum ada satupun penjelasan yang memadai tentang alasan AS memilih Israel dan rasionalitas serta tujuan dari hubungan inipun sulit ditunjukkan.

Pandangan bahwa Israel adalah sekutu strategis AS di Timur Tengah dan bahwa keseimbangan konstelasi politik di Timur Tengah akan terus terjaga apabila AS membela Israel masih dianggap tidak berdasar. Israel bahkan dianggap tidak mampu menjaga kepentingan AS di Timur Tengah. Ilmuwan Cheryl Rurenberg mengungkapkan: "Dalam hubungan AS-Israel, Amerika telah memberikan dukungan mutlak, tapi Israel berkali-kali melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan-kepentingan AS bahkan kerap membahayakan kepentingan-kepentingan tersebut."⁴⁸

Menurut John Mearsheimer dan Stephen Walt, alasan terakhir mempertanyakan nilai strategis Israel adalah bahwa Israel tidak bertindak sebagaimana sekutu yang setia. Petinggi-petinggi Israel kerap mengabaikan Permintaan AS dan melanggar janji-janji termasuk janji untuk menghentikan pembangunan pemukiman dan menahan diri dari pembunuhan terencana terhadap pemimpin-pemimpin Palestina. Israel juga mensuplai teknologi senjata militer sensitif dari pesaing potensial seperti Cina dan melakukan tindakan spionase paling agresif di antara sekutu-sekutu AS.⁴⁹

⁴⁸ John Mearsheimer dan Stephen Walt, *Op.cit.* hal. 12

⁴⁹ *Ibid*, hal. 25

Selain itu, anggapan bahwa hubungan keduanya lebih dikarenakan adanya persamaan nilai hidup bersama yakni kebebasan, demokrasi dan penghormatan terhadap HAM juga tidak berdasar. Israel adalah negara yang bersifat eksklusif-ekspansionis sementara hukum dan praktik hidup rakyat di AS tidak memberi ruang bagi tumbuhnya sikap-sikap itu. Menurut Todd, ketidakadilan yang terus menerus terhadap Palestina oleh kolonisasi Yahudi di tanahnya sendiri menjadi bantahan prinsip persamaan yang menjadi pondasi negara demokrasi.⁵⁰

Argumentasi tentang hubungan Amerika Serikat-Israel di atas tidak berpengaruh terhadap sikap Pemerintah AS terhadap Israel. Israel tetap menerima bantuan ekonomi maupun militer secara konsisten setiap tahun. Israel menerima sekitar 3 triliun dolar AS bantuan langsung setiap tahun. Hal ini menunjukkan betapa besar perhatian yang diberikan oleh pemerintah AS terhadap eksistensi Negara Israel. Menurut John Mearsheimer dan Stephen Walt, Israel adalah satu-satunya penerima bantuan yang tidak perlu melaporkan untuk apa dana tersebut digunakan, dan karenanya, menjadi tidak mungkin untuk mencegah uang tersebut digunakan demi sesuatu yang ditentang sendiri oleh Amerika Serikat, seperti pembangunan pemukiman di Tepi Barat. Amerika Serikat juga dilaporkan memberi hampir 3 triliun dolar AS untuk mengembangkan sistem persenjataan dan juga akses ke persenjataan

⁵⁰ Emmanuel Todd, *Menjelang Keruntuhan Amerika*, Terjemahan Siwi Purwandari, Menara – Bekasi, 2006 hal.148

rahasia seperti helicopter Blackhawk dan jet F-16. AS juga memberi Israel akses Inteligen ke sekutu NATO-nya dan juga menutup mata terhadap kepemilikan senjata nuklir oleh Israel.⁵¹

Uraian terhadap bantuan pemerintah AS yang dikemukakan oleh John Mearsheimer dan Stephen Walt di atas membuktikan bahwa pemerintah AS dalam pengambilan keputusan politik luar negerinya terhadap Israel mengesampingkan pertimbangan-pertimbangan akan resiko yang ditimbulkan. Bukankah pemberian bantuan tanpa pertanggung jawaban memungkinkan Israel menggunakannya untuk pembangunan pemukiman di tepi barat, pada akhirnya hanya akan membangkitkan sikap anti Amerika dari warga Palestina dan bahkan dunia?

Selain bantuan ekonomi dan militer tersebut, menurut keduanya, Amerika Serikat juga selalu memberikan dukungan diplomatik secara konsisten kepada Israel. Dan terbukti, Amerika Serikat sudah 32 kali memveto resolusi DK PBB yang menyinggung Israel.

Keberpihakan AS pada Israel juga dapat dilihat pada kebijakan Bush yang mendukung Aneksasi sepihak Israel di wilayah pendudukan. Menurut John Mearsheimer dan Stephen Walt, Bush telah membalikan kebijakan setiap presiden AS sejak Lyndon Johnson.

Dukungan nyata AS terhadap Israel juga dapat dilihat ketika pada April 2002, IDF melancarkan Operation Devensive Shield dan mulai mengontrol tanpa rasa

⁵¹ John Mearsheimer dan Stephen Walt, *Op.cit.* hal. 19

malu sebagian besar wilayah Palestina di tepi barat. Saat itu, kendatipun pemerintah AS masih keberatan, pada tanggal 2 Mei 2002, kongres mengabaikan keberatan pemerintah dan mengeluarkan dua resolusi yang menguatkan dukungan terhadap Israel. Resolusi tersebut menyatakan bahwa AS berdiri bersama Israel dalam solidaritas dan bergabung dalam perjuangan bersama melawan terorisme.

2. Perang Afganistan

Peristiwa 11 september 2001 menghadirkan slogan perang melawan terorisme yang dikumandangkan pemerintah AS dibawah komando Presiden Bush. Peristiwa penabrakan gedung WTC yang disinyalir dilakukan oleh kelompok teroris pimpinan Osama bin Laden tersebut memicu sikap pemerintah AS menyerang Afganistan. Menurut Dewi Fortuna Anwar, serangan teroris ke AS membuka peluang bagi kelompok konservatif dalam pemerintahan Bush untuk merealisasikan doktrin *pre-emptive strike* yang sudah lama mereka kemukakan, untuk memusnahkan ancaman maupun potensi dari manapun sumbernya.⁵²

Segera setelah peristiwa 11 september tersebut, di hadapan kongres AS, Bush mengajukan proposal penyerangan ke Afganistan dengan dalih memburu pimpinan Al-Qaeda, Osama bin Laden. Proposal perang dengan anggaran sebesar US\$ 40 miliar itupun langsung disetujui kongres walaupun belum ada bukti yang

⁵² Dewi Fortuna Anwar, *Jurnal Demokrasi dan HAM: Tatanan Dunia Pasca Invasi AS ke Irak*, Vol. 3, No.2, Mei - September 2003, hal. 20

meyakinkan tentang keterkaitan Al-Qaeda dalam tragedi WTC tersebut. Pemerintah AS memutuskan menyerang Afganistan dan menumbangkan rezim Taliban yang dituding melindungi kelompok teroris. Ambisi Bush untuk menyerang Afganistan seakan tidak menemui hambatan apapun karena kongres AS secara penuh mendukung kebijakan tersebut. Kongres AS langsung mengeluarkan resolusi agar Presiden Bush diberi wewenang penuh untuk menggunakan kekuatan dan kekerasan bilamana dinilai patut dan tepat.

Dari keseluruhan anggota kongres, hanya satu suara yang menentang keputusan menyerang Afganistan tersebut. Satu-satunya suara yang menyatakan ketidaksepakatan atas resolusi tersebut datang dari Chynthia McKinney, demokrat dari Georgia. Menurutnya, kekerasan belum tentu bisa mencegah terulangnya aksi-aksi teror internasional terhadap Amerika Serikat.

Keputusan pemerintahan Bush untuk menyerang Afganistan, menurut Bush, lebih dikarenakan adanya upaya rezim Taliban untuk melindungi kelompok teroris. Walaupun teroris bertindak bukan atas nama negara dan tindakan terror merupakan ancaman non tradisional, AS membalas serangan tersebut seolah-olah sedang menghadapi agresi militer konvensional.

Amerika Serikat berdalih bahwa rezim Taliban membiarkan wilayah Afganistan dipakai oleh kelompok Al-Qaeda yang tetap merupakan ancaman bagi Amerika Serikat, sehingga untuk menghancurkan Al-Qaeda dan mencegah aksi terror selanjutnya rezim Taliban pun harus ikut dihancurkan.

Menurut Dewi Fortuna Anwar, tindakan pembalasan yang dilakukan oleh AS terhadap rezim Taliban di Afganistan, untuk kejahatan yang dilakukan oleh individu-individu dari negara lain yang tidak berkaitan langsung dengan rezim tersebut, melangkah jauh dari perang pembalasan yang diperbolehkan oleh piagam PBB ketika menghadapi agresi militer dari negara lain.⁵³ Dalam bukunya yang berjudul *Lobi Zionis dan Rezim Bush*, Herry Nurdi mengungkapkan bahwa hampir 4000 orang dilaporkan tewas dalam serangan militer Amerika Serikat tersebut.⁵⁴

3. Invasi militer ke Irak

Pada bulan maret 2003, pemerintah AS dengan dibantu oleh sekutu-sekutunya melakukan invasi militer ke Irak. Tudingan akan kepemilikan senjata pemusnah massal menjadi alasan agresi militer AS ke Irak.

Menanggapi tudingan tersebut, pemerintah Irak pada awal januari 2003 telah mengambil sikap dengan menyatakan menerima resolusi DK PBB No. 1441 yang isinya menuntut Irak untuk mengizinkan dan memberikan akses sepenuhnya kepada UNMOVIC dan IAEA untuk meneliti segala hal yang berkaitan dengan persenjataan yang dimiliki Irak dan UNMOVIC (*United Nation Monitoring, Verification and Inspection comission*) yakni tim Inspeksi senjata PBB pun sudah

⁵³ *Ibid*, hal. 20

⁵⁴ Herry Nurdi, *Op.cit.* hal. 18

melaksanakan tugasnya. Akan tetapi, ambisi AS untuk menyerang Irak tidak surut kendatipun belum ditemukannya bukti-bukti yang otentik dan akurat terkait kepemilikan senjata tersebut.

Dalam jurnal *Demokrasi dan Ham* edisi Mei-September 2003, Riza Sihbudi mengungkapkan bahwa dalam konferensi pers yang diadakan pada tanggal 6 maret 2003, Bush kembali menegaskan niatnya untuk menginvasi Irak, dengan atau tanpa persetujuan DK PBB. Padahal dalam waktu yang bersamaan, baik ketua UNMOVIC, Hans Blix, maupun direktur IAEA, Mohammed ElBaradei dengan gambling mengemukakan bahwa tidak ada bukti-bukti kongkrit perihal pelanggaran Irak terhadap resolusi DK PBB No.1441.⁵⁵

Laporan UNMOVIC maupun IAEA tersebut tidak akan merubah keputusan AS untuk menginvasi Irak. Bush sudah menegaskan niatnya untuk menginvasi Irak, dengan atau tanpa persetujuan DK PBB. Ijin atas proposal aksi militer Bush yang dikeluarkan oleh Senat dan Kongres AS memuluskan langkah Bush menyerang Irak.

Proposal dengan anggaran perang sebesar 48 miliar dolar itu telah disetujui Senat dan Kongres AS. Di sidang anggota senat, 77 suara mendukung Bush dan hanya 23 suara saja yang menolak aksi militer AS ke Irak. Anggota senat dari partai demokrat, masing-masing 28 orang mendukung serangan tersebut dan 22 lainnya menolak. Sedangkan dari 50 anggota senat yang berasal dari partai republik, hanya satu suara yang menentang aksi tersebut.

⁵⁵ Riza Sihbudi, *Jurnal Demokrasi dan HAM: Tatanan Dunia Pasca Invasi AS ke Irak*, Vol. 3, No.2, Mei – September 2003, hal. 31

Sementara itu, di *House of Representative*, sebanyak 296 anggota kongres memberikan suaranya untuk menyerang Irak, dan 133 suara lainnya menolak. Sebagian besar suara yang menolak ini datang dari partai demokrat, sedangkan dari partai republik, dari 221 anggotanya di *House of Representative*, hanya 6 suara yang menyatakan menolak.⁵⁶

Invasi ke Irak dengan anggaran sekitar 48 miliar dolar ini pun sepertinya tidak mendapat hambatan apapun. Kongres Amerika Serikat tanpa pertimbangan apapun langsung memberi restu.

Dukungan mutlak dari senat dan kongres AS ini menjadikan pemerintah AS dengan di bantu sekutu-sekutunya yakni Inggris, Australia dan Spanyol menginvasi Irak pada pertengahan maret 2003. Invasi yang secara tidak langsung merusak reputasi Amerika Serikat dimata dunia Internasional.

4. Sikap AS atas Isu Nuklir Iran

Hubungan Amerika Serikat – Iran kembali mengalami krisis ketika wacana seputar pengembangan nuklir Iran mengemuka. Kedua negara terlibat ketegangan ketika Amerika Serikat menuduh program pengayaan uranium oleh Pemerintah Iran merupakan upaya Iran mengembangkan senjata nuklirnya dan pada akhirnya membahayakan keamanan Internasional. Hal ini mendapat protes keras dari Iran

⁵⁶ Herry Nurdi, *Op.cit.* hal. 9

karena Iran terlibat dalam penandatanganan Nonproliferasi (NPT) yang artinya program nuklirnya hanya untuk tujuan-tujuan damai.

Dalam pidato kenegaraan pada bulan Januari 2002 presiden Amerika Serikat, George W. Bush menegaskan bahwa Amerika Serikat menganggap program nuklir Iran sebagai suatu hal yang sangat membahayakan. Menurut pemerintah Amerika Serikat, program nuklir Iran lebih besar dari yang diperkirakan semula dan Amerika Serikat memiliki bukti yang memperkuat tuduhan tersebut.

Semenjak itu, baik Iran maupun Amerika Serikat saling terlibat aksi-aksi provokatif. Amerika Serikat gencar menggalang dukungan dari negara-negara Eropa untuk mendukungnya menghentikan ambisi nuklir Iran dan kerap mengancam akan menyerang Iran jika Iran tetap bersikeras menolak menghentikan program nuklirnya. Harian Kompas edisi Kamis 20 April 2006 mengetengahkan pernyataan Bush yang menegaskan bahwa opsi untuk menyerang Iran tidak akan dikesampingkan. Menurut Bush "semua opsi masih berlaku. Kami ingin menyelesaikan masalah ini secara diplomatik dan kami akan berusaha keras untuk itu". Akan tetapi, Bush menegaskan bahwa serangan nuklir terhadap Iran dapat dilakukan jika upaya diplomatik gagal mencegah ambisi Iran memiliki senjata nuklir.⁵⁷

Sebaliknya, Iran juga berusaha merebut dukungan dari negara-negara lain, khususnya dari Rusia dan Cina. Menanggapi ancaman penggunaan militer yang disampaikan pihak Amerika Serikat, Iran bahkan balik mengancam. Pemimpin

⁵⁷ Surat Kabar KOMPAS edisi Jumat, 28 April 2006

tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei mengancam Washington bahwa Iran akan menyerang kepentingan Amerika Serikat di seluruh dunia jika Amerika Serikat sampai menyerang Iran. Khamenei mengungkapkan “bila AS menyerang Iran, Iran akan membalas dengan menghancurkan kepentingan-kepentingan AS di dunia, dua kali lebih dahsyat dari serangan AS ke Iran.”⁵⁸

Sebenarnya, isu nuklir Iran kembali mengemuka beberapa hari sebelum tragedi 11 September 2001. Dukungan dari pihak golongan neokonservatif dalam pemerintahan Bush turut berperan dalam hal ini. Pada tanggal 5 september 2001, Israel menyampaikan kepada pihak pejabat Pentagon AS bahwa Israel siap menyerang instalasi-instalasi nuklir Iran. Menurut M. Abdul Rahman, kecemasan AS dan Israel atas program nuklir Iran terfokus pada empat isu. *Pertama*, pusat-pusat riset dan reaktor nuklir yang sedang dalam pembangunan. *Kedua*, rencana Iran membangun program pengelolaan uranium dan terminal penyimpanan bahan plutonium. *Ketiga*, upaya sejumlah agen-agen Iran membeli bahan yang bisa digunakan untuk tujuan ganda, yakni sipil dan militer. *Keempat*, program pengembangan rudal darat-ke-darat yang membawa kepala nuklir.

Terlepas dari isu tersebut di atas, kebijakan Amerika Serikat yang terus menerus menekan pemerintah Iran bisa menyeret kedua negara untuk terlibat dalam

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ M.Abdul Rahman, *Iran Pasca Revolusi*, Kompas-Jakarta,2003 hal.200

konflik yang lebih serius. Bush dalam banyak kesempatan selalu menegaskan bahwa AS akan menggunakan kekuatan militer apabila upaya penyelesaian dengan cara-cara damai tidak berhasil. Jika demikian, bukan tidak mungkin apabila Iran kemudian mengalami nasib yang sama seperti yang dialami Irak. Apalagi, jika dicermati, motifnya hampir sama.

5. Undang-Undang Restorasi Kedaulatan Lebanon dan Akuntabilitas Syria.

Pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan Undang-Undang Restorasi Kedaulatan Lebanon dan Akuntabilitas Syria dimana Undang-undang ini resmi ditandatangani oleh Presiden Bush pada tanggal 12 desember 2003.

Rancangan Undang-undang ini diajukan di Capitol Hill oleh anggota kongres, Eliot Engel, dan menurut *Jewish Telegraph Agency*, dirancang oleh beberapa sahabat baik Israel di kongres.^{60 John,86.}

Isi dari Undang-undang tersebut antara lain berupa ancaman sanksi terhadap Syria jika Syria tidak menarik pasukan dari Lebanon, menyerahkan senjata pemusnah massalnya dan berhenti mendukung terorisme . selain itu, isi undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa Syria dan Lebanon mengambil langkah nyata untuk berdamai dengan Israel.

Rancangan undang undang ini sebelumnya ditolak oleh pemerintahan Bush. Menurut John dan Walt, pemerintahan Bush tidak terlalu antusias menanggapi

⁶⁰ John Mearsheimer dan Stephen Walt, *Op.cit.* hal. 86

rancangan undang-undang ini. Akan tetapi, undang-undang ini lolos meyakinkan di kongres, di mana di House Of Representative, 398 suara menyatakan setuju dengan hanya berbanding 4 yang menolak, dan di Senat, 89 anggota menyatakan setuju dan hanya 4 yang menolak.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Lobi Yahudi terhadap Kebijakan Luar Negeri AS di Timur Tengah

Keberadaan lobi Yahudi di pemerintahan Amerika Serikat diakui hampir semua kalangan. Eksistensi kelompok lobi pro Israel ini pun dinilai sebagai sebuah kewajaran dalam situasi demokrasi apalagi di sebuah negara pengusung demokrasi seperti Amerika Serikat. Akan tetapi, ketika kekuatan lobi sampai mengeliminir pertimbangan-pertimbangan rasional serta mengabaikan kepentingan nasional yang seyogyanya menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan luar negeri sebuah negara, apakah ia masih bisa disebut sebagai sebuah kewajaran? Apalagi kepentingan yang diusungnya adalah kepentingan negara lain.

Gambaran di atas bisa dipakai untuk mendeskripsikan bagaimana perumusan kebijakan luar negeri dalam pemerintahan Amerika Serikat dan kekuatan lobi pro Israel yang bermain di dalamnya. Amerika Serikat sebagai sebuah negara super power seakan telah masuk dalam perangkap yang dipasang oleh kelompok-kelompok lobi Yahudi yang pro Israel. Bahkan, Kathleen menilai, kekuatan lobi Yahudi telah membuat para *decision makers*nya tidak mampu berpikir secara independen. Kekuatan lobi Yahudi terbukti telah mampu menuntun para perumus kebijakan luar negeri AS untuk menerapkan kebijakan yang sejalan dengan kepentingan mereka, khususnya kebijakan luar negeri AS terhadap Timur Tengah.

Berikut ini merupakan beberapa contoh kebijakan Pemerintahan George W. Bush terhadap Timur Tengah dan bagaimana kelompok-kelompok lobi Yahudi berperan di dalamnya. Kebijakan-kebijakan dimaksud antara lain:

1. Dukungan terhadap Israel

Dukungan mutlak pemerintahan Washington terhadap Israel terus berjalan. Begitu pula ketika pemerintahan AS di bawah pimpinan Presiden George W. Bush. Amerika Serikat nyaris tidak pernah berseberangan dengan Israel dalam setiap kebijakan luar negerinya di Timur Tengah. Pemerintah AS terus memberi dukungan financial, diplomatik, dan militer sementara di sisi lain, Israel terus tampil sebagai negara yang tidak mengindahkan setiap resolusi PBB serta terus melanggar hukum-hukum Internasional. Kolusi AS-Israel tampak nyata pada penetapan standar ganda yang diberlakukan pemerintah AS dalam pelaksanaan resolusi-resolusi DK PBB yang berkaitan dengan masalah Timur Tengah.

Banyak pihak yang sudah mempertanyakan hubungan AS-Israel terutama dari kalangan masyarakat AS. Menurut John Mearsheimer dan Stephen Walt, orang mungkin berasumsi bahwa ikatan antara kedua belah negara didasari kepentingan strategis bersama atau ada alasan moral yang mendasar, namun sejauh ini, tak ada satupun penjelasan mengapa AS memberikan dukungan luar biasa terhadap Israel berupa materi maupun diplomasi.

Menurut kedua akademisi di atas, melindungi Israel bukan merupakan sebuah kebijakan yang murah karena pada akhirnya harus dibayar mahal. Sebagai contoh,

keputusan untuk memberi bantuan darurat militer sebesar 2,2 triliun dolar AS selama perang oktober 1973 memicu embargo minyak OPEC yang mengakibatkan kerusakan cukup parah bagi perekonomian negara-negara barat. Pada kasus itu, angkatan bersenjata Israel tidak memposisikan diri untuk melindungi kepentingan AS di kawasan tersebut. Selain itu, AS juga tidak bisa mengandalkan Israel saat revolusi Iran tahun 1979 yang menaikkan perhatian AS pada keamanan suplay minyaknya, dan karenanya AS terpaksa membentuk sendiri Rapid Deployment Force.⁶²

Dua contoh kasus di atas dikemukakan John dan Walt hanya untuk mengemukakan bahwa penjelasan mengenai Israel sebagai sekutu strategis sebenarnya jauh dari memuaskan. Begitu juga mengenai alasan moral yang melandasinya. Israel adalah negara yang eksklusif-ekspansionis. Sementara hukum dan praktik hidup rakyat AS tidak memberi ruang bagi tumbuhnya sikap-sikap itu.

Selain John dan Walt, ilmuwan Cheryl A. Rurenberg dalam *Israel and the American Nation Interest* (1986), menulis

“Dalam hubungan AS-Israel, Amerika telah memberikan dukungan mutlak, tapi Israel berkali-kali melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan-kepentingan AS, bahkan kerap membahayakan kepentingan-kepentingan tersebut.”⁶³

Terkait alasan moral yang melandasi hubungan kedua negara, Paul Findley, mantan anggota kongres AS, menulis:

“Salah satu omong kosong paling berbahaya dan paling luas diyakini mengenai hubungan AS-Israel adalah bahwa kedua negara itu mempunyai

⁶² John Mearsheimer dan Stephen Walt, *Op.cit.* hal. 22

⁶³ *Ibid.*, hal.12

cita-cita, struktur demokrasi, dan penghargaan pada hak-hak asasi manusia yang sama. Ini merupakan khayalan yang menyulitkan setiap upaya perdamaian. Israel bukan negara demokrasi. Ia tidak mempunyai konstitusi. Ia melancarkan diskriminasi terutama atas dasar agama dan bersikap kasar bahkan brutal terhadap kelompok minoritas. Ia adalah sebuah negara yang bersifat eksklusif dan ekspansionis”.⁶⁴

Ketika kendali pemerintahan AS di tangan Bush, kebijakan politik luar negerinya terhadap Timur Tengah pun belum berubah. AS justru terus berperan dan memberikan kontribusi terhadap krisis dan eskalasi kekerasan di Timur Tengah. Bantuan secara financial maupun diplomatik untuk Israel terus berjalan. Disinilah peran lobi Yahudi sebagai pengawal kepentingan Israel di Amerika.

Pemerintahan Bush terus melanjutkan kebijakan pemimpin terdahulunya untuk memberikan bantuan ekonomi berupa 3 triliun dolar AS bantuan langsung setiap tahun. Selain itu, bantuan-bantuan lainnya pun terus mengalir untuk Israel. Findley mengungkapkan:

“Bantuan Amerika untuk Israel bukan hanya terbatas pada bantuan ekonomi saja. Washintong telah menjadikan Israel sebagai “sekutu strategis”, menetapkannya sebagai sekutu non-NATO, memberinya status perdagangan bebas, dan membiarkannya ikut serta dalam sebagian besar riset teknis paling canggih dalam Inisiatif Pertahanan Strategis AS. Itu belum semua”.⁶⁵

Kebijakan ini tidak lepas dari peran AIPAC sebagai kekuatan lobi yahudi terbesar di AS. H.Nurdi menulis:

“.....AIPAC tidak hanya memastikan segala bantuan untuk Israel berjalan dan mengalir lancar, tapi juga menekan pemerintah agar hal ini tak menjadi

⁶⁴ Paul Findley, *Diplomasi Munaflik Ala Yahudi*, terjemahan Rahmani Astuti, Penerbit Mizan – Bandung 1995, hal. 326

⁶⁵ *Ibid*, hal.171

pembicaraan public, apalagi sampai menjadi bahan diskusi nasional. Di dalam AIPAC, bernaung sekitar 52 lembaga bertaraf nasional yang separuhnya berafiliasi langsung dengan Israel...⁶⁶

Pemerintahan Bush sebenarnya mendapatkan tekanan dan tuntutan dari masyarakat Amerika Serikat agar menahan diri untuk membantu dan mem-*back up* Israel. Pada Mei 2003, sebuah survey yang 60% respondennya meminta agar Amerika menahan bantuan untuk Israel sampai negara Zionis ini menghentikan konflik di Palestina. Bahkan, hasil survey tersebut menunjukkan bahwa 73% respondennya menginginkan Amerika tidak terlibat, apalagi mendukung pihak tertentu dalam konflik di Timur Tengah.⁶⁷

Menghadapi situasi tersebut di atas, H. Nurdi mengemukakan bahwa lobi Israel bekerja ekstra keras untuk mengendalikan situasinya. Satu kesalahan kecil saja, menurutnya, mampu membuat opini publik berubah.

Sikap pemerintah Bush atas konflik Israel-Palestina

Pada musim semi 2002 pemerintahan Bush gagal mengubah kebijakan Israel dan Washington tetap saja membantu Israel sehingga Israel batal mundur dari

⁶⁶ Herry Nurdi, *Op.cit* , hal. 70

⁶⁷ *Ibid*, hal. 186

wilayah okupasi. Sesudah itu, pemerintahan Bush malah mengikuti pembenaran ala Israel, hasilnya, retorika AS pun mulai meniru retorika Israel. Pada februari 2003 sebuah *headline* yang dimuat *Washington Post* menulis bahwa Bush dan Sharon hampir identik dalam memandang kebijakan di Timur Tengah. Menurut Mearsheimer dan Walt, lobi Israel tentu saja berada di balik itu semua.⁶⁸

Kebijakan mendukung Israel dan membiarkan pemerintahan Sharon melanjutkan kebijakan ekspansi di wilayah pendudukan bukan semata-mata keputusan politik pemerintahan Bush. Keputusan politik ini justru lahir karena kekuatan lobi Yahudi dalam lingkaran pemerintahan Bush.

Pemerintahan Bush ketika itu sebenarnya mencoba untuk meredam sentiment anti Amerika di dunia Arab, dan mengurangi dukungan terhadap kelompok teroris seperti Al-Qaeda dengan menghentikan kebijakan ekspansi di wilayah pendudukan dan menyokong pembentukan negara Palestina. Akan tetapi, menurut John Mearsheimer dan Sthepen walt rencana kebijakan Bush ini mendapat tantangan luar biasa.

Kasus ini dimulai pada akhir September 2001, saat Bush mendesak Sharon untuk mengekang diri dari wilayah pendudukan. Bush juga menekan Sharon untuk mengizinkan menteri luar negeri Israel, Shimon Peres bertemu Yasser Arafat, meski ketika itu Bush sendiri sangat kritis terhadap kepemimpinan Arafat. Bush bahkan

⁶⁸ John Mearsheimer dan Stephen Walt, *Op.cit.* hal. 61

secara terang-terangan menyatakan dukungannya terhadap pendirian negara Palestina. Bush, oleh Sharon kemudian dituduh menenangkan bangsa Arab dan mengorbankan Israel seraya mengingatkan bahwa Israel tidak bakal bisa dicekoslowakia-kan. tuduhan ini menimbulkan kemarahan Bush.

Menurut Mearsheimer dan Walt, akademisi dari AS lewat artikelnya *The Israel Lobby*, Sharon kemudian meminta maaf dan segera bergabung dengan lobi Israel untuk membujuk pemerintahan Bush dan rakyat Amerika bahwa AS dan Israel menghadapi ancaman yang sama, yakni terorisme. Menurut keduanya, petinggi-petinggi Israel dan perwakilan-perwakilan lobi menekankan bahwa tidak ada perbedaan yang nyata antara Arafat dan Osama bin Laden: AS dan Israel, menurut mereka, seharusnya mengisolasi pemimpin Palestina terpilih dan tidak bekerja sama dengan mereka.

Masih menurut John dan Walt, lobi Israel juga bergerak di kongres. Pada 16 September 2001, 89 senator mengirim surat kepada Bush memuji dia karena menolak bertemu Arafat, juga menuntut AS agar tidak mengekang Israel untuk membalas serangan rakyat Palestina. Pemerintah AS, tulis mereka, harus menyatakan secara terbuka berdiri di belakang Israel. Menurut *New York Times*,⁶⁹ surat tersebut digagas dari pertemuan 2 minggu sebelumnya antara “pemimpin komunitas Yahudi Amerika dan senator-senator kunci”, seraya menambahkan bahwa AIPAC juga “aktif secara

⁶⁹ *Ibid*, hal. 61

khusus memberi masukan dalam surat tersebut”.

Setelah itu, memasuki bulan November 2001, hubungan Washington dan Tel Aviv meningkat secara luar biasa. Ini semua berkat upaya dan kerja keras lobi Israel. Akan tetapi, pada bulan April 2002, Israel kembali berubah. Ketika itu IDF melancarkan *Operation Defensive Shield* dan mulai mengontrol tanpa rasa malu sebagian besar wilayah Palestina di Tepi Barat.

Bush memahami bahwa tindakan Israel ini akan merusak citra AS di kalangan dunia Islam dan akan menghambat perang terhadap terorisme, sehingga Ia menuntut Sharon “menghentikan serangan dan mulai menarik mundur pasukan”.⁷⁰ Bush menggarisbawahi pesan ini seraya mengungkapkan bahwa Israel “menarik diri tanpa menunda”.

Pada tanggal 7 April 2002, Condoleezza Rice, ketika itu penasihat Bush di bidang keamanan nasional, dihadapan wartawan menyampaikan pernyataan Bush tersebut seraya mengingatkan kalau “tanpa menunda” artinya penarikan mundur pasukan Israel harus dilakukan sekarang. Di hari yang bersamaan, Collin Powell bertolak menuju Timur Tengah untuk membujuk semua pihak agar menghentikan pertikaian dan memulai negosiasi.

Israel dan Lobi segera beraksi. John dan Walt menulis bahwa pejabat-pejabat pro Israel di kantor wakil Presiden dan Pentagon, juga cendekiawan neo-konservatif seperti Robert Kagan dan William Kristol, mulai menekan Powell dan menuduhnya

⁷⁰ *Ibid*, hal 61

“buta terhadap perbedaan yang jelas antara terorisme dan upaya memerangi terorisme”. Bush sendiri mendapat tekanan dari pemimpin-pemimpin Yahudi dan penginjil-penginjil Kristen.

Terkait masalah ini, Herri Nurdi menulis:

“...lobi Israel mulai beraksi. Collin Powell mendapat tekanan dari lobi Israel yang bercokol di kantor Wakil Presiden, Dick Cheney dan juga lobi yang berkuasa di Pentagon. Mereka bahkan mengeluarkan *statement* bahwa Powell tak mengerti mana yang teroris dan mana yang melawan teroris. Bush juga mendapat tekanan dari pemimpin-pemimpin Yahudi dan juga penginjil Kristen anggota jaringan Zionis”.⁷¹

Tidak hanya sampai di situ, Tom De Lay dan Dick Armev berbicara khusus ke public tentang perlunya mendukung Israel, dan De Lay bersama pemimpin minoritas di Senat, Trent Lott, mengunjungi Gedung Putih mengingatkan Bush untuk menarik diri.

Awal yang menandai kekalahan Bush dimulai pada tanggal 11 april 2002, seminggu setelah ia mengingatkan Sharon untuk menarik mundur pasukannya, tatkala juru bicara Gedung Putih menyatakan bahwa Presiden percaya bahwa Sharon adalah *A man of peace*, pemimpin yang cinta perdamaian. John dan Walt mengungkapkan:

“Bush mengulang kembali *statement* tersebut di hadapan public saat kepulangan powel dari misinya yang gagal, dan Ia juga mengatakan kepada wartawan bahwa Sharon telah memberi respon memuaskan atas seruannya untuk penarikan segera dan secara penuh. Sharon tidak melakukan itu, dan Bush pun tak lagi mengutarakan isu serupa”.⁷²

⁷¹John Mearsheimer dan Stephen Walt, *Op.Cit*, hal. 187

⁷²*Ibid*, hal 65

Sementara itu, Kongres juga bergerak di belakang Sharon. Tanggal 2 mei 2002, kongres mengabaikan keberatan pemerintah dan meloloskan 2 resolusi yang menguatkan dukungan terhadap Israel. Voting yang dilakukan di Senat, 94 mendukung banding 2 sedangkan di House of Representative, 352 yang mendukung banding 21. resolusi tersebut menyatakan bahwa AS “berdiri bersama Israel dalam solidaritas” dan bahwa dua negara itu, mengutip resolusi yang dikeluarkan oleh House of Representative, “bergabung dalam perjuangan bersama melawan terorisme”. Kedua resolusi itu mencuat karena bantuan Lobi Israel.⁷³

Sikap pemerintahan Bush tersebut di atas mengindikasikan betapa kuatnya lobi Yahudi dalam mempengaruhi keputusan politik pemerintahan Bush. Jonh dan Walt bahkan menulis bahwa sesungguhnya ini adalah kemenangan Yahudi Amerika, bukan Sharon atau Israel yang memainkan peran kunci mengalahkan Bush.

2. Perang Afganistan

Afganistan memiliki nilai strategis dari segi geopolitik dan ekonomi dalam percaturan kekuatan regional dan global. Letak Afganistan berada di persimpangan jalan yang menghubungkan Semenanjung India, Asia Tengah dan Timur Tengah. Jalur sutra (*Silk Road*) yang dahulu menjadi urat nadi perdagangan, sebagian berada di Afganistan. Karena itu, sejak era Aleksander Agung, Dinasti Safavid (Iran), Dinasti Moghul (India), dan colonial Inggris di India, semua mengincar jalur strategis ini. Sejarah panjang di bumi Afganistan ini dapat dipahami dari perbenturan

⁷³ *Ibid*

kepentingan politik untuk menguasai daerah strategis ini.⁷⁴

Awal oktober, tepatnya tanggal 7 Oktober 2001, pemerintah AS kembali menambah panjang daftar sejarah penderitaan warga Afganistan yang juga dikarenakan oleh benturan kepentingan. Operasi perang dengan nama sandi *Operation Enduring Freedom* ini, oleh pemerintahan Bush ditujukan untuk memburu Osama bin Laden, dan rezim Taliban disinyalir menyembunyikannya.

Kebijakan AS untuk menyerang Afganistan ini menguat setelah tragedi 11 september 2001. Osama bin Laden dan kelompok Al-Qaeda, oleh Amerika serikat disebut-sebut sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap aksi peledakan WTC tersebut.

Invasi militer ke Afghanistan menjadi proyek pertama Bush dalam menjalankan kebijakan perang totalnya melawan terorisme. Alasan penyerbuan militer AS ke Afghanistan pun dirancang secara meyakinkan, yakni bahwa pemerintah di bawah kelompok Taliban dijalankan dengan penuh otoriter, tidak demokratis, serta banyak melanggar hak asasi manusia.

Selain itu, diciptkanlah sebuah kesimpulan untuk meyakinkan dunia akan keabsahan invasinya ke Afghanistan itu dengan mengincar Osama bin Laden sebagai tokoh kunci di balik pembajakan pesawat komersial yang meledakkannya ke gedung kembar WTC serta gedung Pentagon itu.

⁷⁴ Iwan Hadibroto, dkk., *Perang Afganistan*, Gramedia Pustaka Utama – Jakarta, 2002 hal. 71

Sesaat setelah peristiwa 11 september tersebut, tepatnya pada tanggal 14 september 2001, dihadapan sidang paripurna Kongres AS, Presiden George Bush menyampaikan pidato mengajak seluruh rakyat Amerika untuk berperang melawan Terorisme. Bush menyebutnya sebagai perang untuk keadilan.

Pemerintahan Bush mengabaikan kecaman dunia Internasional dan tetap melancarkan serangan militer untuk menghancurkan jaringan Al-Qaeda, menangkap pimpinannya Osama bin Laden dan sekaligus menumbangkan rezim Taliban yang berkuasa di Afganistan. Senat AS bahkan langsung menyetujui penggunaan dana sebesar 40 miliar dolar AS untuk operasi tersebut.

Kebijakan militeristik Bush dengan penggunaan anggaran sebesar 40 miliar dolar AS tersebut tidak mendapat kendala apapun dari Kongres AS. Bahkan Kongres AS mengeluarkan resolusi agar Presiden Bush diberi wewenang penuh untuk menggunakan kekuatan dan kekerasan bilamana dinilai patut dan tepat. Resolusi ini lolos meyakinkan dengan persetujuan bulat dimana dari 421 anggota Kongres, hanya Cynthia McKinney, seorang demokrat dari Georgia yang menolak.⁷⁵ McKinney yang juga merupakan anggota Sub-komite Internasional dan Hak Asasi Manusia ini menilai bahwa kekerasan belum tentu bisa mencegah terulangnya aksi-aksi teroris terhadap AS.

Selain itu, McKinney juga menuntut agar Pemerintah harus terlebih dahulu menunjukkan bukti-bukti keterlibatan Osama bin Laden sebelum melakukan serangan

⁷⁵ *Ibid*, hal 33

tersebut. Dihadapan kongres AS Ia mengungkapkan:

“Menteri luar negeri Colin Powell telah mengatakan bahwa negara-negara sekutu kita telah menerima bukti-bukti kuat keterlibatan bin Laden dalam peristiwa tragis itu. Akan tetapi, sebelum penggunaan kekuatan militer terjadi, rakyat Amerika juga harus melihat bukti-bukti itu”.⁷⁶

Kendati demikian, suara McKinney tidak lantas menyurutkan niat pemerintah Bush untuk menyerang Afganistan. Restu kongres menjadi legitimasi kebijakan militeristiknya. Kongres telah mengeluarkan resolusi untuk memberi wewenang pada pemerintahan Bush melancarkan aksinya tanpa sedikitpun ada perdebatan didalamnya. Padahal, kesepakatan dalam pengambilan keputusan penting dan beresiko biasanya berlangsung alot dan melelahkan. Tapi tidak untuk kali ini.

Masyarakat Amerikapun mendukung kebijakan Bush untuk menyerang Afganistan ini. Hasil survey pertama atas opini publik mengenai serangan 11 september itu yang dilaporkan oleh Will Lester dari *Associated Press* menyatakan bahwa mayoritas warga Amerika sangat marah dan langsung mendukung rencana Presiden Bush memerangi terorisme.

Jajak pendapat lain yang dilakukan oleh ABC-Washinton Post, CBS, CNN-Time Magazine dan NBC, menunjukkan dukungan penuh kepada Bush untuk mengambil tindakan keras secara militer, sekalipun akan menjadi suatu perang yang lebih luas dan berkepanjangan.⁷⁷

⁷⁶ *Ibid*, hal 33

⁷⁷ *Ibid*

Selain dukungan dari masyarakat Amerika, dukungan penuh juga diperoleh dari masyarakat Internasional. Menurut Dewi Fotuna Anwar, Masyarakat Internasionalpun menunjukkan simpati pada kerugian yang diderita AS. AS berhasil menggalang dukungan dan partisipasi Internasional untuk menyatakan perang terhadap terorisme.⁷⁸

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa baik masyarakat Amerika maupun Internasional menyatakan simpati dan dukungan atas kebijakan perang Presiden Bush dikarenakan oleh adanya tindak terorisme pada peristiwa 11 september yang mengakibatkan Amerika Serikat menderita kerugian yang cukup besar. Masyarakat Amerika maupun dunia Internasional memandang bahwa kebijakan ini semata-mata lahir karena adanya serangan teroris yang merugikan Amerika. Akan tetapi, benarkah demikian?

Herri Nurdi dalam bukunya *Lobi Zionis dan Rezim Bush* mengungkapkan bahwa serangan ke Afganistan hanya soal waktu saja. Jauh sebelum peristiwa 11 september 2001, Amerika sudah merancang serangan ke negeri para Mullah itu. Salah satu tujuannya selain minyak adalah melemahkan kekuatan Islam.⁷⁹

⁷⁸ Dewi Fortuna Anwar, *Jurnal Demokrasi dan HAM: Tatanan Dunia Pasca Invasi AS ke Irak*, Vol. 3, No.2, Mei – September 2003, hal. 20

⁷⁹ Herry Nurdi, *Op.cit.* hal. 200

Nurdi menulis:

“Skenario menyerang Afganistan tampaknya memang sudah benar-benar dirancang. Sekali lagi, bahkan sebelum peristiwa runtuhnya gedung WTC terjadi. Pada 3 september 2001 misalnya, terkuak data bahwa Dewan Keamanan Nasional AS menyetujui bantuan dana dan juga militer pada pasukan aliansi Utara di Afganistan. Aliansi utara seperti yang kita ketahui, kelak menjadi kekuatan khusus yang digunakan dari dalam Afganistan untuk menjatuhkan Taliban”.⁸⁰

Pernyataan di atas membuktikan adanya skenario yang memang telah disusun oleh Amerika Serikat sebagai upaya menyerang Afganistan dan menjatuhkan Taliban. Ini bahkan telah dimulai jauh sebelum adanya peristiwa 9 september. Dan jika demikian maka, peristiwa 11 september hanya sebagai pemicu dan bukan penyebab satu-satunya serangan AS ke Afganistan.

Bahkan sebelum 3 september 2001, media-media seperti *Jane's International Security*, *The Guardian*, *India Reacts*, dan juga sebuah buku terbitan Perancis berjudul: “*Bin Laden: The Forbidden Truth*” karya Jean Charles Brisard dan Guillaume Dasquie menuliskan, Afganistan telah menjadi target perang sebelum musim dingin 2001 tiba.⁸¹ Media-media tersebut memprediksikan bahwa Afganistan akan diserang sebelum salju turun, yakni antara bulan September dan Oktober 2001. dan kenyataannya, awal Oktober 2001, Afganistan diserang secara besar-besaran oleh AS.

Kendatipun Afganistan diserang dengan dalih perang melawan terorisme, kebijakan Amerika Serikat menyerang Afganistan ini tidak lepas dari pengaruh para

⁸⁰ *Ibid*, hal 202

⁸¹ *Ibid*, hal 203

penggiat lobbi, khususnya lobi Yahudi yang pro-Israel.

Herri Nurdi menulis:

"....peristiwa 11 september 2001, kemudian memunculkan perang melawan terorisme yang tidak terbatas wilayah jangkauannya. Perang melawan teroris, telah membuat Amerika menyerang Afganistan, dan juga telah meluluhlantakkan Irak, dan tentu saja dukungan lobi Israel dalam peristiwa-peristiwa ini sangat vital dan berperan besar".⁸²

Dalam bukunya *Lobi Zionis dan Rezim Bush*, Nurdi mengungkapkan bahwa pada 15 september 2001, Paul Wolfowitz, salah satu tokoh terkemuka neo-konservatif yang juga anggota jaringan lobi Yahudi, menemui Presiden Bush di Camp David dan menyarankan agar Amerika menyerang Irak terlebih dahulu ketimbang Afganistan. Akan tetapi dilaporkan bahwa Bush menolak rencana tersebut dengan pertimbangan bahwa Saddam Hussei tidak terkait dengan serangan ke Amerika dan yang terlibat adalah Osama bin Laden yang saat ini berada di Afganistan. Karena itu, sebagaimana yang diungkap Nurdi, lobi Israel menyusun strategi baru agar setelah Afganistan, Amerika akan menyerang Irak.

Gambaran di atas kembali menunjukkan bagaimana peran kelompok kepentingan lobi Yahudi terlibat dan berperan besar dalam keputusan politik luar negeri Amerika Serikat. Dan sekali lagi, komposisi pemerintahan Bush yang menghadirkan banyak anggota lobi Israel yang berada satu tim bersamanya,

⁸² *Ibid*, hal.82

menjadikan mereka begitu mudah untuk mempengaruhi setiap kebijakan yang di ambil Bush.

3. Invasi Militer ke Irak

Pemerintahan Bush kembali menerapkan Kebijakan militeristiknya. Pada 21 maret 2003, Amerika Serikat melancarkan agresi militer terhadap rakyat dan negara Irak. Amerika Serikat dengan dibantu oleh sekutu-sekutunya seperti Inggris, Australia dan Spanyol akhirnya melakukan invasi militer dengan mengabaikan keberatan yang diajukan negara-negara lain, bahkan tanpa menunggu keputusan DK PBB.

Tuduhan pengembangan senjata pemusnah massal serta kejahatan-kejahatan yang di lakukan rezim Saddam di Irak menjadi alasan bagi AS untuk menyatakan perang terhadap Irak. Akan tetapi, tuduhan tentang program *Weapon of Mass Destruction* (senjata pemusnah massal) di Irak belum bisa di buktikan sepenuhnya. Ketika AS dan Inggris mengultimatum Irak pada awal maret lalu, disaat yang bersamaan baik ketua UNMOVIC, Hans Blix maupun Direktur IAEA, Mohammed ElBaradei, secara gamblang sudah mengemukakan bahwa tidak ditemukannya bukti-bukti yang konkrit perihal pelanggaran Irak terhadap Resslerusi DK PBB No. 1441.⁸³ (resolusi 1441 disahkan pada 8 november 2002, yang isinya antara lain menuntut Irak untuk mengizinkan dan memberikan akses sepenuhnya kepada UNMOVIC dan IAEA

⁸³ Riza Sihbudi, *Jurnal Demokrasi dan HAM: Tatanan Dunia Pasca Invasi AS ke Irak*, Vol. 3, No.2, Mei – September 2003, hal. 31

untuk meneliti segala hal yang berkaitan dengan persenjataan yang dimiliki oleh Irak) Ironisnya, AS mengabaikan hal tersebut dan tetap menginvasi Irak. Jika demikian, apa sesungguhnya yang memotivasi AS untuk menyerang Irak?

Menurut John Mearsheimer dan Walt:

“Sebagian rakyat Amerika meyakini bahwa perang tersebut demi minyak, akan tetapi hampir tidak ada bukti langsung yang mendukung klaim tersebut. Malah, perang tersebut lebih dimotivasi oleh keinginan menjadikan Israel lebih aman”.⁸⁴

Philip Zelikow, mantan anggota Foreign Intelligence Advisory Board Presiden AS, direktur eksekutif dari Komisi 9/11 yang juga konselor Condoleezza Rice, mengungkapkan bahwa “ancaman nyata” dari Irak bukanlah ancaman untuk AS. Ancaman yang tidak disebut-sebut adalah ancaman terhadap Israel. Menurutnya, pemerintah Amerika tidak ingin membicarakan ini karena bukan dagangan yang populer.⁸⁵

Herri Nurdi menulis:

“kuatnya pengaruh lobi Israel didalam pemerintahan Amerika, baik dalam lembaga eksekutif maupun legislative, sekali lagi nampak begitu vulgar ketika tragedi perang Irak. Sebab, perang Irak adalah salah satu strategi pengamanan Israel dalam peta baru di Timur Tengah. Dan strategi pengamanan itu tidak akan berhenti sampai ancaman-ancaman atas Israel, baik yang berbentuk negara atau kelompok radikal berhasil dimusnahkan”.⁸⁶

⁸⁴ John Mearsheimer dan Stephen Walt, *Op.cit.* hal. 68

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ Herry Nurdi, *Op.cit.* hal. 93

Beberapa pandangan di atas menunjukkan bahwa invasi militer AS atas Irak lebih dikarenakan oleh adanya kepentingan menjadikan Israel lebih aman di kawasan Timur Tengah. Amerika Serikat lebih memilih melayani kepentingan Israel ketimbang menjalankan kepentingan nasionalnya sendiri. Dan hal ini terjadi berkat kuatnya cengkraman Lobi Yahudi dalam tubuh pemerintahan Amerika Serikat.

Israel menjalankan segala cara untuk bisa menekan pemerintahan Bush merealisasikan agenda politik mereka menggulingkan Saddam. Pada tanggal 16 september 2002, 11 hari sebelum Dick Cheney memulai kampanye perang di hadapan Veterans of Foreign Wars, *Washinton Post* melaporkan bahwa Israel mendesak pejabat-pejabat AS agar tidak menunda serangan militer ke Saddam Husein. Menurut Sharon (PM Israel), dengan poin ini, AS dan Israel telah mencapai dimensi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan pejabat-pejabat intelijen Israel telah memberi berbagai macam laporan peringatan tentang program *Weapon of Mass Destruction* (WMD) Irak.⁸⁷

Ehud Barak, dalam sebuah rubrik di *New York Times* mengingatkan bahwa bahaya paling besar sekarang sedang merunduk. Perdana menteri pendahulunya, Benyamin Netanyahu, mempublikasikan hal serupa di *Wall Street Journal* dengan judul "alasan menggulingkan Saddam". Menurutnya, saat ini, tak ada pilihan yang lebih tepat selain melucuti rezimnya.⁸⁸

⁸⁷ John Mearsheimer dan Stephen Walt, *Op.Cit.* hal. 69

⁸⁸ *Ibid*

Upaya menekan pemerintah Bush tidak hanya dilakukan dari luar. Menurut John dan Walt, di dalam negeri AS sendiri, kekuatan utama dibalik perang adalah kelompok kecil neo-konservatif, yang banyak memiliki hubungan dengan Partai Likud (partai garis keras yang memerintah di Israel). Mereka didukung oleh tokoh-tokoh organisasi yang tergabung dalam Lobi Israael.

Editorial *Forward* melaporkan bahwa Organisasi lobi Yahudi paling berpengaruh di AS mengerahkan dukungan untuknya. Dalam setiap pernyataan para pemimpin komunitas tersebut, mereka selalu menekankan perlunya menggulingkan Saddam dan melucuti senjata pembunuh massalnya. Selanjutnya, editorial Koran tersebut mengungkapkan bahwa keamanan Israel yang sebenarnya menjadi faktor pertimbangan kelompok-kelompok utama Yahudi.⁸⁹

Kelompok neo-konservatif yang ada dalam tubuh pemerintahan Bush memang berperan besar dalam invasi AS ke Irak. Sebagaimana diketahui, kelompok neo-konservatif sangat aktif mendorong pengembangan doktrin *pre-emptive strike* yang dianut AS pasca peristiwa 11 september.

Riza Sihbudi, ahli peneliti utama dan Kepala Bidang Perkembangan Politik Internasional pada Pusat Penelitian Politik Lembaga Penelitian Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) mengungkapkan:

“...dalam kasus Irak pun tampak jelas kuatnya pengaruh faksi garis keras di lingkaran elite politik Gedung Putih. Mereka, yang dimotori oleh Wapres Dick Cheney, Menhan Donald Rumsfeld, Deputi Menhan Paul Wolfowitz, serta Penasehat Keamanan Nasional (NSC) Condoleezza Rice, memang dikenali sebagai kelompok “neo-konservatif” yang selalu mengedepankan

⁸⁹ *Ibid*, hal.73

pendekatan pragmatis dan sangat militeristis.....selain berwatak militeristis, mereka juga sangat pro-Israel. Oleh karena itu, ambisi Bush untuk melucuti senjata Irak juga dimaksudkan untuk mengeliminir ancaman militer Arab terhadap Israel⁹⁰

Neo-konservatif yang sementara bekerja dalam koridor kekuasaan pun memainkan perannya. John dan Walt mengungkapkan bahwa cendekiawan seperti Bernard Lewis dari Universitas Princeton dan Fouad Ajami dari John Hopkins dilaporkan memainkan peran penting dalam membujuk Cheney bahwa perang adalah pilihan terbaik. Neo-konservatif yang ada di kalangan staf seperti Eric Edelman, John Hannah, dan Scooter Libby, kepala Staf Wakil Presiden Dick Cheney yang termasuk salah satu yang paling berpengaruh dalam pemerintahan juga memainkan peran mereka.

Di luar pemerintahan, cendekiawan neo konservatif tidak ingin kehilangan momen dalam menciptakan opini bahwa menyerang Irak adalah strategi penting untuk memenangi perang melawan terorisme. Upaya mereka sebagian berupa tekanan terus menerus terhadap Bush, dan sebagian lagi mengatasi para penentang perang yang ada dalam pemerintahan maupun di luarnya. Tanggal 20 september, sebuah kelompok terdepan dari neo-konservatif mempublikasikan surat terbuka yang isinya menyatakan bahwa, bahkan bila bukti yang ditemukan tidak langsung melibatkan Irak dalam serangan 9/11, strategi apapun yang bertujuan untuk membasmi terorisme harus memasukkan upaya penggulingan Saddam dari kekuasaan di Irak.⁹¹

⁹⁰ Riza Sihbudi, *Jurnal Demokrasi dan HAM: Tatanan Dunia Pasca Irvasi AS ke Irak*, Vol. 3, No.2, Mei – September 2003, hal. 35

⁹¹ *Ibid*, hal.76

konservatif terkemuka dan Michael Maloof, seorang Amerika keturunan Lebanon yang punya kaitan erat dengan Richard Perle (salah satu neo-konservatif).⁹²

Di samping itu, kelompok lain di Pentagon, *Office of Special Plans* (kantor perencana khusus), ditugaskan untuk mengungkap bukti yang dapat digunakan untuk menjual perang. Lembaga ini diketuai oleh Abram Shulski, juga seorang neo-konservatif yang mempunyai hubungan dengan Wolfowitz, juga perekrut pemikir-pemikir pro-Israel.

Kenyataan-kenyataan tersebut di atas mengindikasikan adanya keterkaitan langsung kelompok lobi Yahudi, juga komunitas-komunitas pro-Israel lainnya yang memainkan peran yang cukup besar terhadap keputusan AS menginvasi Irak. Kenyataan tersebut di atas juga sekaligus mengeliminir anggapan banyak pihak tentang kepentingan minyak di balik perang Irak.

Ian Lustick, professor Ilmu Politik Universitas Pennsylvania, yang juga dikenal sebagai pengembang kebijakan Bush mengungkapkan bahwa walaupun minyak melarbelakangi Invasi militer ke Irak, tetapi ia bukan merupakan pendorong utama. Menurutnya, minyak dipandang oleh para pendukung perang sebagai cara untuk membayar operasi militer yang sangat mahal. Dalang tersembunyi yang sangat berpengaruh kuat adalah Israel.⁹³

⁹² John Mearsheimer dan Stephen Walt, *Op.Cit*, hal.77

⁹³ Herry Nurdi, *Op.Cit*, hal.133

Berkaitan dengan ini, Shirley Williams, pengamat politik terkemuka asal Inggris yang kini menetap di Amerika mengungkapkan bahwa, yang terjadi saat ini adalah cerminan dari kelompok fundamentalis Yahudi dan fundamentalis Kristen yang berkolaborasi.⁹⁴ Hal ini semakin menegaskan adanya kepentingan Israel di balik penerangan ke Irak. Dan kepentingan tersebut dimainkan oleh kelompok-kelompok Lobi Yahudi Amerika.

Jim Moran, anggota Kongres AS, segera setelah perang Irak dimulai mengungkapkan bahwa invasi ke Irak adalah kerja tangan Yahudi Amerika yang memegang posisi penting di Gedung Putih. "Jika bukan karena dukungan yang kuat dari kelompok Yahudi, Amerika tidak akan menyerang Irak". Setelah pernyataannya, Moran menuai badai kritik dan posisinya kian hari kian melemah.⁹⁵

4. Sikap AS Atas Kasus Iran

Konspirasi paling akhir yang dibangun Amerika Serikat terhadap Iran terkait dengan proyek nuklir sipil negara ini. Proyek nuklir sipil Iran yang legal secara hukum itu ternyata terus-menerus diganggu oleh AS dan negara-negara Barat lainnya. Amerika Serikat seakan tidak pernah berhenti mengumbar tuduhan bahwa proyek nuklir Iran bertujuan untuk memproduksi senjata pembunuh massal, dan ini berarti ancaman serius bagi keamanan dunia tanpa pernah mampu membuktikan otentisitas tuduhan-tuduhannya itu. Amerika Serikat mengancam akan memberlakukan sejumlah

⁹⁴ *Ibid*, hal.94

⁹⁵ *Ibid*.

tindakan seperti embargo ekonomi atau tindakan militer terhadap Iran jika proyek nuklir tersebut tidak juga dihentikan oleh Teheran.

Akan tetapi usaha AS terus mendapat tantangan dari Iran sendiri. Iran, yang sejauh ini mengklaim bahwa program nuklirnya demi kepentingan sipil, berkali-kali menegaskan tidak akan mundur dari sikapnya. Pemimpin spiritual Iran, Ali Khamenei menegaskan bahwa Iran akan menghancurkan kepentingan-kepentingan AS di seluruh dunia jika AS sampai menyerang Iran.⁹⁶

Senada dengan Ali Khamenei, Presiden Republik Islam Iran, Mahmoud Ahmadinejad, kembali membela hak bangsa Iran dengan mengatakan, "Dalam kondisi apapun meski diintimidasi, Teheran tak akan menangguhkan aktivitas nuklir sipilnya." Ahmadinejad dalam wawancaranya dengan Televisi milik pemerintah Belarusia Senin kemarin mengatakan, "Berbeda dengan pemberitaan yang dikembangkan oleh Barat, harus diakui bahwa Iran tidak berupaya membuat bom atom dan program pengembangan teknologi nuklir bukan untuk kepentingan militer."⁹⁷

Bush sendiri, menjelang pertemuannya tanggal 20 april 2006 dengan Presiden Cina Hu Jiantao, kembali menegaskan bahwa Opsi menyerang Iran tetap berlaku. Menurut Bush, serangan nuklir terhadap Iran dapat dilakukan jika upaya diplomatik

⁹⁶ *KOMPAS* edisi Jumat, 28 April 2006

⁹⁷ http://www.irib.ir/worldservice/melayuRADIO/POLITIK/mei04/plan_attack.htm, diakses pada Kamis, 01 November 2007 09:33 WIB

gagal mencegah ambisi Iran memiliki senjata nuklir.⁹⁸ Kedua negara terlibat dalam aksi-aksi konfrontasi dan berusaha mengalahkan secara diplomatik.

Isu nuklir Iran telah menjadi salah satu isu keamanan Internasional terpenting dalam dua tahun terakhir. AS terus menggalang dukungan dari masyarakat Internasional untuk bersama-sama menghentikan bahaya nuklir Iran yang menurut AS membahayakan keamanan Internasional. AS juga menekan organisasi PBB untuk segera melucuti senjata nuklir Iran. Sebuah kondisi yang sangat ironis mengingat Iran terlibat dalam penandatanganan Nonproliferasi (NPT) yang artinya Iran berhak menggunakan dan mengembangkan energi nuklir untuk tujuan damai.

Kondisi ini tidak lepas dari peran dan pengaruh lobi Yahudi. Selain penggiat lobi yang sangat pro terhadap Israel, para petinggi-petinggi Israel juga memainkan peran yang cukup besar dalam menciptakan kondisi tersebut di atas.

Sebenarnya, Sharon (ketika itu menjabat sebagai PM Israel) mulai menekan AS untuk menghadapi Iran pada bulan November 2002, dalam sebuah wawancara dengan *Times*. Ia, menggambarkan Iran sebagai "pusat teror dunia", dan berupaya memiliki senjata nuklir. Sharon mengungkapkan bahwa Pemerintahan Bush seharusnya bertindak keras terhadap Iran, begitu selesai menaklukkan Irak. Akhir april 2003, *Ha'aretz* melaporkan bahwa duta besar Israel di Washintong menyerukan pergantian rezim di Iran.

Pernyataan-pernyataan di atas merupakan awal dari kampanye Israel untuk

⁹⁸ *KOMPAS* edisi Kamis, 20 April 2006

menangguhkan program nuklirnya. Karenanya, lobi Israel mengintensifkan tekanannya. Editorial-editorial dan artikel lainnya mengingatkan bahaya besar dari nuklir Iran, juga bahaya mendiamkan rezim teroris, sembari mengisyaratkan untuk mengambil tindakan pencegahan bila jalur diplomasi gagal.

Lobi Israel, masih menurut John dan Walt, juga berusaha keras menekan kongres AS untuk mengesahkan UU Dukungan bagi pembebasan Iran, yang akan melebar menjadi pemberian sanksi yang nyata. Sedang petinggi-petinggi Israel juga mengingatkan bahwa mereka akan mengambil tindakan penyerangan terlebih dahulu (*pre-emptive action*) bila Iran meneruskan program nuklirnya. Ancaman itu dimaksudkan agar Washintong tetap memberi perhatian pada isu tersebut.

John dan Walt menulis:

“Orang mungkin berdalih bahwa Israel dan Lobinya tidak memiliki banyak pengaruh terhadap kebijakan mengenai Iran, karena AS punya alasan sendiri mengapa harus mencegah Iran meneruskan program nuklirnya. Ada beberapa fakta mengenai hal ini, tetapi ambisi nuklir Iran tidak langsung mengancam AS. Bila Washintong bisa hidup dengan nuklir Uni Soviet, nuklir Cina, atau bahkan nuklirnya Korea Utara, AS juga bisa menerima nuklir Iran. Itulah sebabnya Lobi Israel terus-menerus menekan politisi untuk berkonfrontasi dengan Teheran. Iran dan AS hampir tak bisa menjadi sekutu andaikan Lobi Israel tidak ada, tetapi kebijakan AS akan lebih lunak dan perang tidak akan menjadi pilihan serius”¹⁰¹

Pandangan di atas menunjukkan bahwa kebijakan AS atas nuklir Iran bukan semata-mata dikarenakan oleh program nuklir Iran itu sendiri. Sikap AS atas nuklir Iran lebih dikarenakan adanya tekanan dari Lobi dan juga Petinggi - petinggi Israel.

¹⁰¹ *Ibid*, hal.91

Kebijakan AS mungkin akan lebih berimbang jika kalangan penggiat Lobi Yahudi dan pejabat Israel berhenti untuk menekan AS dan tidak secara terus-menerus menggambarkan Iran sebagai pusat teror dengan bahaya nuklirnya. Pertanyaannya, seberapa besarkah ancaman nuklir Iran bagi AS sehingga AS begitu gencar menekan lembaga Internasional seperti PBB dan terus menggalang dukungan dari negara-negara lain untuk menghentikan bahkan menjatuhkan sanksi bagi Iran bila Iran menolak menanggukkan program nuklirnya?

Sekali lagi, kebijakan AS atas isu nuklir Iran ini lebih didasari oleh kepentingan menjadikan Israel lebih aman di kawasan Timur Tengah. Dan ini semua berkat kerja lobi yang semakin menggurita di lingkaran pemerintahan Bush. Sejauh ini, usaha lobi Yahudi dan Israel belum sepenuhnya berhasil akan tetapi setidaknya mereka berhasil membuat DK PBB mengeluarkan resolusi 1747 yang berisi tentang pemberlakuan sanksi bagi Iran.

Selain itu, lobi juga sekali lagi berhasil membuat pemerintahan Bush menempuh kebijakan luar negeri yang sejalan dengan kepentingan Israel dan bukan kepentingan Amerika Serikat sendiri.

5. Undang-undang Restorasi Kedaulatan Lebanon dan Akuntabilitas Syria

Pemerintah Amerika Serikat resmi mengeluarkan Undang-Undang Restorasi Kedaulatan Lebanon dan Akuntabilitas Syria ketika RUU tersebut ditandatangani oleh Presiden Bush pada tanggal 12 Desember 2003. Undang-Undang tersebut pada awalnya diajukan oleh salah satu anggota kongres AS, Eliot Engel di Capitol Hill.

Isi dari Undang-Undang tersebut berupa ancaman sanksi terhadap terhadap Syria jika Syria tidak menarik pasukan dari Lebanon, menyerahkan senjata pemusnah massalnya, dan berhenti mendukung terorisme dan juga menyerukan kepada Syria dan Lebanon untuk mengambil langkah nyata berdamai dengan Israel. Menurut Mearsheimer dan Stephen Walt, legislasi ini didukung habis-habisan oleh Lobi Israel, khususnya AIPAC, dan di rancang, menurut *Jewish Telegraph Agency*, oleh sahabat baik Israel di Kongres.¹⁰²

Kebijakan AS terhadap Syria ini pun, sekali lagi, merupakan buah dari tekanan yang dilakukan oleh para pejabat Israel, dengan dibantu oleh komunitas Lobi Yahudi lewat tokoh-tokoh konservatif dan para pendukung Israel lainnya di lingkaran pemerintahan AS terhadap Washintong.

Sharon dan perwira-perwiranya mulai mendesak Washintong untuk menyerang Damaskus tatkala Baghdad jatuh pada April 2003. pada tanggal 16 April 2003, ketika diwawancarai oleh *Yedioth Ahronah*, Sharon menyerukan AS untuk menekan habis-habisan Syria. Tidak hanya Sharon, Shaul Mofaz, Menteri Pertahanannya, dalam sebuah wawancara di *Ma'ariv*, menyatakan: “kami sudah memiliki daftar panjang dari isu yang kami kira akan kami tuntutan dari Syria dan yang paling pas adalah hal itu dilakukan lewat tangan orang-orang Amerika”.¹⁰³

¹⁰² *Ibid*, hal.86

¹⁰³ *Ibid*, hal. 85

Ephraim Halevi, di hadapan audiensi WINEP mengungkapkan bahwa, adalah penting bagi AS saat ini untuk bertindak tegas terhadap Syria. Selain itu, *Washinton Post* melaporkan bahwa Israel “mengompori kampanye” melawan Syria dengan menyediakan laporan intelijen untuk AS tentang sepak terjang Bashar Assad, Presiden Syria.

Seperti biasanya, pernyataan petinggi-petinggi Israel tersebut di atas, langsung mendapat respon dari para pendukung Israel di AS. Anggota-anggota terkemuka dari lobi Israel juga mengeluarkan argument serupa. Paul Wolfowitz mengeluarkan statement tentang harus adanya pergantian rezim di Syria sedang Richard Perle, mengungkapkan dihadapan wartawan sebuah pesan pendek, pesan dua kata, yang dapat dikirimkan ke rezim-rezim musuh lainnya di Timur Tengah: “kamu berikutnya”¹⁰⁴

Kampanye Israel dan para pendukungnya untuk Syria tidak hanya berhenti sampai di situ. Mearsheimer dan Stephen Walt melaporkan bahwa di awal bulan april 2003, WINEP (salah satu lembaga think-thank AS yang dimotori oleh anggota lobi Yahudi) mengeluarkan laporan yang didukung oleh dua partai yang berkuasa (Republik dan Demokrat) yang menyatakan bahwa Syria seharusnya tidak gagal menangkap pesan bahwa negara-negara yang tidak suka dengan kesembronoan Saddam, tidak bertanggung jawab dan selalu bersikap menantang dapat mengakhiri nasib seperti Saddam.

¹⁰⁴ *Ibid*, hal.85

Tidak hanya itu, keduanya melaporkan bahwa, tanggal 15 April, Yossi Klein Halevi membuat tulisan singkat di *Los Angeles Times* dengan judul: "Selanjutnya, arahkan sasaran ke Syria". Sementara pada hari berikutnya, Zev Chafets menulis sebuah artikel untuk *New York Daily News* dengan judul: "Syria, Sang Sahabat Teroris, Juga Perlu Perubahan". Tidak ketinggalan, Lawrence Kaplan menulis di *New Republic* tanggal 21 April bahwa Assad adalah ancaman serius bagi AS.

Kampanye Israel dan komunitas Lobi Yahudi terhadap Syria berjalan mulus. Undang-Undang Restorasi Kedaulatan Lebanon dan Akuntabilitas Syria yang dikeluarkan Kongres AS dan ditandatangani oleh Presiden Bush merupakan puncak dari perjuangan mempengaruhi kebijakan luar negeri Bush. Sekali lagi, Israel dan komunitas lobinya berhasil merumuskan kebijakan luar negeri AS yang sejalan dengan kepentingan Israel.

Kongres AS kembali menunjukkan konsistensi dukungannya terhadap Israel. UU Restorasi Kedaulatan Lebanon dan Akuntabilitas Syria, kendatipun menurut John dan Walt tidak terlalu antusias ditanggapi oleh pemerintahan Bush, lolos secara meyakinkan. Di House of Representative, 398 suara menyatakan setuju banding 4 suara yang menolak, sedang di Senat, 89 setuju banding 4.¹⁰⁵

Meskipun UU Restorasi Kedaulatan Lebanon dan Akuntabilitas Syria telah resmi ditandatangani Bush, pemerintah AS sendiri sebenarnya masih berbeda pendapat. Kalangan neo-konservatif sangat menginginkan AS memerangi Damaskus,

¹⁰⁵ *Ibid*, hal.86

akan tetapi CIA dan State Departement menentang ide tersebut. Bush sendiri, meskipun menandatangani UU tersebut, menegaskan akan menjalankannya secara perlahan-lahan. Keraguan Bush tersebut, menurut John dan Walt bisa dipahami karena beberapa faktor:

➤ Pertama, Pemerintah Syria tidak hanya menyediakan informasi penting mengenai Al-Qaeda sejak peristiwa 9/11, tetapi juga Syria mengingatkan Washintong tentang rencana serangan teroris di Teluk Parsi dan memberi akses para penyidik CIA ke Mohammed Zammar, orang yang dituduh merekrut sebagian pembajak pesawat saat 9/1. menargetkan pemerintahan Assad berarti membahayakan hubungan yang berharga ini, dan karenanya meruntuhkan perang yang lebih besar melawan terorisme.

➤ Kedua, Syria tidak dalam penilaian buruk oleh Washintong sebelum perang Irak, dimana Syria bahkan ikut menyumbang suara atas resolusi PBB No. 1441 (resolusi yang memerintahkan Irak melucuti senjatanya), dan Syria juga bukan ancaman bagi AS.

➤ Ketiga, menempatkan Syria ke dalam daftar target akan memberi alasan kuat bagi negara itu untuk mengacau Irak. Bahkan, bila ada alasan kuat menekan Syria, yang paling rasional adalah menyelesaikan pekerjaan di Irak terlebih dahulu.¹⁰⁶

Beberapa faktor di atas tidak lantas menyurutkan niat kongres AS untuk

¹⁰⁶ *Ibid*, hal. 89-90

memburu Damaskus. Sebagian besar dikarenakan oleh adanya tekanan dari petinggi-petinggi Israel dan kelompok lobi seperti AIPAC. Karena itu, tidak berlebihan apabila muncul asumsi bahwa bila tidak ada Lobi Israel, tidak ada pula UU Akuntabilitas Syria, dan kebijakan AS terhadap Damaskus akan lebih sejalan dengan kepentingan nasional AS.

Gambaran tentang beberapa kebijakan Pemerintahan Bush di atas mengindikasikan kuatnya pengaruh Lobi Yahudi dalam perumusan kebijakan luar negeri AS terhadap Timur Tengah. Komunitas lobi Yahudi berhasil menyusup sedemikian jauh dalam tatanan politik AS sehingga mampu menempatkan kepentingan Israel sebagai prioritas dalam pengambilan keputusan politik luar negeri AS di Timur Tengah. Persoalan selanjutnya adalah bagaimana dampaknya terhadap legitimasi politik Bush, baik di mata masyarakat Internasional maupun dalam negeri AS sendiri.

B. Dampak Kebijakan Tersebut Terhadap Legitimasi Politik George W. Bush

Amerika Serikat di bawah kendali Presiden George W. Bush telah menerapkan kebijakan yang sangat militeristik sebagai realisasi dari doktrin *pre-emptive strike*. Kebijakan Amerika Serikat di bawah kendali Bush juga cenderung mengabaikan struktur dan sistem Internasional serta institusi-institusi internasional semacam PBB karena Bush merupakan salah satu tokoh yang dikenal berwatak unilateralis.

Melalui penggunaan kekuatan militer yang tidak tertandingi, kebijakan unilateralisme Amerika Serikat di tangan pemerintahan Bush kemudian diarahkan untuk membentuk tatanan dunia sebagaimana yang mereka kehendaki. Akan tetapi, ketika kebijakan semacam ini diterapkan untuk melemahkan atau bahkan menghancurkan negara-negara di kawasan Timur Tengah hanya untuk meminimalisir potensi ancaman demi keamanan Israel di kawasan tersebut, maka hal ini justru berdampak pada Amerika Serikat sendiri. Dukungan penuh pemerintah Bush terhadap Israel menjadikan kebijakan Bush sangat tidak berimbang di Timur Tengah dan hal ini semakin memperlebar jurang anti Amerika, tidak hanya di Timur Tengah tetapi juga di negara-negara lain di dunia. Dan yang penting, kebijakan luar negeri AS terhadap Timur Tengah justru diambil hanya berdasarkan pada situasi politik dalam negeri. Menurut John dan Walt:

“Hebatnya, kebijakan AS pada kawasan tersebut hampir semua berasal dari situasi politik dalam negeri, khususnya aktivitas dari “Lobi Israel”. Ada juga kelompok lain tertentu yang coba mengarahkan kebijakan luar negeri, tapi tak ada lobi yang berupaya sedemikian rupa hingga mengalihkan kepentingan nasional, juga terus-menerus meyakinkan rakyat Amerika bahwa kepentingan negara mereka dan negara lain-dalam hal ini Israel-adalah secara esensial serupa”.¹⁰⁷

Pada akhirnya, penolakan terhadap kebijakan Bush di kawasan Timur Tengah ini bahkan mulai muncul dari dalam negeri Amerika sendiri. Salah satu dampak dari hal ini adalah efeknya terhadap legitimasi politik Bush.

¹⁰⁷ *Ibid*, hal.18

1. Legitimasi politik Bush di Amerika Serikat

Dukungan penuh AS terhadap Israel dan kebijakan yang sangat tidak berimbang pemerintahan Bush di Kawasan Timur Tengah sangat beresiko terhadap hilangnya kepercayaan rakyat Amerika Serikat terhadap kepemimpinan Bush. Padahal, sebuah pemerintahan yang kuat mensyaratkan dukungan dan kepercayaan yang penuh dari rakyat yang diperintah.

Kuatnya pengaruh kelompok-kelompok lobi Yahudi semacam AIPAC menyebabkan pengambilan keputusan politik luar negeri pemerintahan Bush tidak lagi menempatkan kepentingan nasional AS sebagai prioritas. Kondisi ini sangat ironis mengingat kepentingan nasional merupakan kerangka acuan dalam pengambilan keputusan luar negeri sebagaimana yang diungkapkan Plano dan Olton:

“Kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur yang membetuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi.”¹⁰⁸

Konsistensi dukungan pemerintahan Bush terhadap Israel sebagai akibat dari pengaruh komunitas lobi Yahudi ini juga membawa pemerintah Bush kebijakan militeristis yang kerap membawa kerugian besar bagi Amerika Serikat sendiri.

Dinamika sosial dan politik dalam negeri Amerikat Serikat beberapa tahun belakangan bisa menjadi tolak ukur atau indikasi adanya penurunan legitimasi politik Presiden Bush. Demonstrasi anti kebijakan perang Bush yang marak terjadi dalam

¹⁰⁸ Banyu Permata dan M. Yani, *Op.cit.* hal. 35

negeri AS, serta semakin maraknya suara-suara masyarakat yang mempertanyakan sikap dan kebijakan Bush terhadap negara-negara Timur Tengah.

Woodward, penulis terkenal ketika pada tahun 1970-an, bersama Carl Bernstein, membongkar skandal Water Gate yang akhirnya memaksa Presiden AS saat itu, Richard Nixon mengundurkan diri dari jabatan Presiden AS pada tahun 1974, kini, dalam buku terbarunya juga berusaha membongkar berbagai masalah di seputar invasi ke Irak, yang dipastikan akan membuat George W. Bush dan Partai Republiknya kalabakan. Terlebih lagi, saat ini tingkat dukungan masyarakat AS terhadap Bush dalam berbagai masalah, terutama perang Irak dan problema ekonomi AS, telah mencapai tingkat terendah sepanjang 3 tahun yang lalu. Karena itu, penyingkapan berbagai kedok dan skandal yang dilakukan Woodward dapat berubah menjadi kasus yang mencoreng Bush dan Partai Republik.

Bob Woodward dalam buku terbarunya itu memuat berbagai wawancara dengan beberapa pejabat pemerintah Amerika Serikat yang menyimpulkan bahwa keputusan untuk melakukan aksi militer ke Irak telah diambil oleh George W. Bush selang hanya 3 bulan setelah peristiwa 11 September. Padahal, selama satu tahun setelah kejadian yang menghancurkan Gedung Kembar WTC itu, Bush dan penasihatnya berkali-kali menyatakan keinginan mereka untuk menyelesaikan masalah senjata-senjata pembunuh massal Irak dengan jalan damai. Penulis buku "Rencana Serangan" itu yakin bahwa tindakan George W. Bush yang berkali-kali

menipu opini umum telah membuktikan ketidakbecusannya dalam memangku jabatan tertinggi di AS.¹⁰⁹

Senada dengan Woodward, Gore Vidal, sastrawan dan sejarawan terkemuka Amerika, menyebut Amerika sebagai negara yang amnesia. Menurutnya, Amerika Amnesia adalah Amerika yang berteriak tentang demokrasi, Amerika yang berperang demi keadilan, adalah Amerika yang lupa dirinya sendiri. Presidennya telah menjadi diktator, dan negaranya menjadi imperium.¹¹⁰

Menurut Vidal, Amerika semakin hancur, dan kehancuran tersebut semakin tak terkendali ketika Amerika di bawah pemerintahan Bush dan Cheney. Vidal menyebut duet ini sebagai junta yang memerintah Amerika. Sebuah pemerintahan yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Dalam sebuah acara di televisi Australia, SBS, Vidal bahkan berani menyebut Bush sebagai Presiden yang buruk.¹¹¹

Vidal menyebutkan bahwa pemerintah Amerika melakukan kebohongan di hampir semua bidang. Kebohongan tersebut kian menggunung dengan dukungan media, yang menurut Vidal, berada dalam satu mata rantai yang tak terpisahkan dan ironisnya, rakyat Amerika harus harus membayar mahal untuk mendapatkan pemerintahan dan negara seperti ini.

¹⁰⁹ http://www.irib.ir/worldservice/melayuRADIO/POLITIK/mei04/plan_attack.htm diakses pada kamis, 01 november 2007 11:02 WIB

¹¹⁰ Herry Nurdi, *Op.Cit*, hal.27

¹¹¹ *Ibid*, hal. 28

Vidal mengungkapkan:

“Kami menyelenggarakan pemilu yang sangat mahal dan juga yang paling korup. Bayangkan, perlu 3 miliar dolar untuk memilih seorang presiden seperti George Bush. Jadi, kami dalam kegelapan saat ini, terlebih saat kami mempunyai presiden yang lebih gelap lagi. Presiden yang tak tahu tentang dunia dan menjerumuskan kami untuk berperang.”¹¹²

Sumber radio politik, Irib, menyebutkan bahwa dalam tahun 2003, di Amerika Serikat telah terbit sejumlah buku yang khusus menyoroti kinerja pemerintahan George W. Bush dalam berbagai masalah, seperti peristiwa 11 September, perang terhadap terorisme, dan invasi militer ke Irak. Buku-buku tersebut, masing-masing dengan gaya pengungkapannya sendiri, telah menyerang berbagai kebijakan politik dalam dan luar negeri yang diambil oleh pemerintahan Partai Republik, khususnya sayap neo-konservatif.

Terlepas dari isi berbagai buku kritikan terhadap kinerja pemerintah Bush itu, hal yang sangat penting untuk dinilai adalah masalah besarnya sambutan masyarakat negeri Paman Sam ini terhadap buku-buku tersebut. Para analis politik mengetengahkan argumen bahwa perhatian rakyat AS yang sedemikian besar dan mencolok terhadap buku-buku anti George W. Bush itu tak lain sebagai akibat dari banyaknya penipuan opini umum yang selama ini dilakukan oleh pemerintahan Bush. Apalagi, Bush sepanjang 3 tahun pemerintahannya tidak berhasil memberikan jawaban yang memuaskan atas berbagai keraguan-raguan dan kesamar-samaran yang

¹¹² Herry Nurdi, *Op.Cit*, hal.29

meliputi berbagai kasus teroris di negara itu, termasuk mengenai keputusan yang diambil untuk melakukan penyerangan terhadap Irak. Semua itu telah membuat masyarakat AS haus terhadap buku-buku yang mereka harapkan dapat memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka.

Tahun 2002, di saat memuncaknya berbagai protes terhadap pemerintahannya, Presiden AS, George W. Bush menyatakan bahwa dia tidak akan mencampurkan opini umum dengan berbagai keputusan yang harus diambilnya. Bush mengatakan, dia dan penasihatnya hanya akan mengambil keputusan yang menjamin keamanan nasional. Keputusan pemerintah AS untuk menyerang Irak hanya dengan alasan adanya berbagai senjata pembunuh massal di negeri 1001 malam ini, menunjukkan tidak adanya perhatian Gedung Putih terhadap opini umum masyarakat Amerika. Oleh sebab itu, bukan tanpa alasan bila masyarakat AS akhirnya menggandrungi buku-buku yang membongkar skandal pemerintah mereka. Salah satu buku serupa yang ditulis oleh Richard Clark bahkan dalam beberapa hari telah menembus angka 550 ribu exemplar dengan 6 kali cetak ulang.

Masing-masing buku anti-Bush tersebut mengungkapkan berbagai ulasan atas kekeliruan, tipu daya, dan kebohongan pemerintah George W. Bush. Hal ini akan menyebabkan legitimasi Bush dan Partai Republik dalam memimpin negara AS menjadi dipertanyakan. Berlanjutnya proses penerbitan buku-buku anti Bush, yang membuka skandal dan kedok pemerintahannya itu, diramalkan akan semakin gencar pada bulan-bulan ini hingga bulan November tahun ini, sehingga dengan demikian

dapat mengurangi perolehan suara bagi Partai Republik dan kandidat mereka, yaitu George W. Bush dalam pemilu.¹¹³

Salah satu bukti kuat terkait menurunnya legitimasi politik Bush di AS dapat dilihat dari kekalahan partai Republik yang dipimpin Bush dalam Pemilu 7 November 2006 untuk kursi anggota Kongres (House of Representative dan Senat) di AS. Pada waktu George Bush terpilih kembali di tahun 2004, partainya yaitu Partai Republik menguasai mayoritas di House, Senat, Gubernuran. Sejak pemilihan umum 7 November, perimbangan berbalik sehingga ketiga lembaga dikuasai Partai Demokrat dengan perimbangan 51:49 di Senat, 229:196 di House of Representatives dan 28:22 untuk kursi Gubernur.¹¹⁴

Koran *Seputar Indonesia* edisi 10 November 2006 menulis:

"Kesembarangannya di Irak dan upaya anti teror yang gagal membuat Partai Republik kalah pertama kali sejak 1994. Kelihatan sekali melalui berbagai survey bahwa yang membuat Bush kalah adalah kebijaksanaannya di Irak, karena dalam issue ekonomi Bush cukup kuat. Pengakuan kegagalan politik Iran dinyatakan sendiri oleh Bush dan terdramatisasi oleh pengunduran diri Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld yang merupakan tokoh garis keras utama dalam politik di Irak dan Afghanistan".

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa dukungan masyarakat Amerika Serikat terhadap pemerintahan Bush dan partai republik menurun dikarenakan oleh ketidakpuasan masyarakat AS terhadap pelbagai kebijakan pemerintah Bush di Timur

¹¹³ http://www.irib.ir/worldservice/melayuRADIO/POLITIK/mei04/plan_attack.htm diakses pada Sabtu, 03 November 2007 19:42 WIB

¹¹⁴ *Harian Seputar Indonesia edisi* Jumat, 10 November 2006

Tengah, salah satunya mengenai invasi militer ke Irak. Ini berarti, kebijakan Bush dipandang tidak sesuai dengan kepentingan nasional AS sebagai akibat dari aktivitas lobi Yahudi yang mempengaruhinya, dan ini yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan dan dukungan publik AS terhadap kepemimpinannya. Jika formulasi kebijakan luar negeri Bush di Timur Tengah yang dijalankan sesuai atau relevan dengan kebutuhan dalam negeri maka kepemimpinan Bush mungkin mendapat legitimasi tetapi justru karena sebaliknya sehingga kepemimpinan Bush kehilangan legitimasi dalam negerinya.

2. Legitimasi Politik Bush di dunia Internasional

Kebijakan yang sangat tidak berimbang pemerintahan Bush terhadap negara-negara di kawasan Timur Tengah ternyata tidak hanya berdampak pada menurunnya legitimasi politik Bush dalam negeri saja tetapi juga di dunia Internasional. Kebijakan unilateralisme Bush menyebabkan pemerintahannya banyak mendapat kecaman dunia Internasional. Sebut saja ketika Bush menginvasi Irak, beberapa negara yang dulu sering bergabung mendukung kebijakan AS, kali ini lebih memilih menyatakan penolakannya terhadap kebijakan tersebut.

Dari kelompok negara-negara yang menentang kebijakan perang Irak, Jerman tampil di urutan paling depan dan keras menentang rencana serangan tersebut. Kanselir Jerman saat itu, Gerad Schroeder mengungkapkan: "di bawah kepemimpinan saya, Jerman tidak akan saya biarkan turut berpetualang dalam

kebijakannya”.¹¹⁵ Sementara itu, negara-negara yang dulu terlibat mendukung Amerika dalam perang teluk, namun kali ini menolak mendukung perang Irak ini adalah Mesir dan Syria.

Nelson Mandela, presiden Afrika Selatan, termasuk salah satu tokoh yang tidak percaya pada propaganda Bush. Menurut Mandela, betapa mengerikan jika ada negara yang mengabaikan PBB kemudian menyerang negara independen dengan seenaknya. Ia mengungkapkan: “Amerika ingin menyerang Irak hanya demi kepentingan minyak dan penjualan senjata serta alat perang saja”.¹¹⁶

Terkait kebijakan invasi militer AS ke Irak, Dewi Fortuna Anwar mengungkapkan:

“Dengan melakukan serangan *pre-emption* terhadap suatu negara berdaulat, berdasarkan asumsi-asumsi ancaman yang masih bersifat spekulatif, AS tanpa malu-malu telah menempatkan dirinya di atas hukum internasional yang berlaku, atau menganggap bahwa aturan internasional yang ada tidak mengikat dirinya sebagai satu-satunya negara adidaya. Hal ini merupakan aktualisasi dari doktrin Bush yang menyebabkan AS dikecam oleh hampir seluruh negara di dunia, termasuk oleh sebagian sekutunya di Eropa”.¹¹⁷

Menurut Dewi Fortuna, sejak keputusan AS untuk menyerang Irak tanpa persetujuan DK PBB, citra AS sebagai “*benign superpower*” sirna. Ia menilai, demonstrasi anti-perang secara besar-besaran diberbagai balahan dunia, termasuk di negara-negara sekutu AS sendiri, menunjukkan bahwa kini Washington dipandang sebagai agresor. Walaupun AS berdalih bahwa serangannya ke Irak adalah untuk

¹¹⁵ Dewi Fortuna, *Op.Cit*, hal.9

¹¹⁶ Herry Nurdy, *Op.cit*. hal.10

¹¹⁷ Dewi Fortuna *Op. Cit*, hal. 9

membebaskan rakyat Irak dari tirani rezim Saddam, namun sebagian besar masyarakat internasional melihat tindakan tersebut sebagai perang yang tidak sah, dan kehadiran pasukan AS di Irak sebagai pendudukan atas negara yang berdaulat.

Menurut Agus Sriyono dalam *Hubungan Internasional: Percikan Pemikiran Diplomat Indonesia*, berkurangnya secara signifikan dukungan internasional terhadap kebijakan AS mengenai Irak disebabkan oleh sedikitnya tiga faktor. Pertama, adanya pergeseran isu, dari terorisme (Afganistan) ke pergantian rezim (Saddam Hussein) di Irak. Kedua, kegagalan AS meyakinkan dunia bahwa Saddam menyimpan senjata pemusnah massal. Ketiga, besarnya pengaruh kaum “unilateralis baru” dalam proses pengambilan keputusan politik di AS.¹¹⁸

Terkait tuduhan kepemilikan senjata pemusnah massal, Sriyono menulis:

“Menyangkut pembuktian kepemilikan senjata pemusnah massal, kini saatnya AS mengatakan hal sebenarnya kepada dunia. Jika AS tidak berhasil menemukan senjata pemusnah massal, bukan saja kredibilitas pemerintah Bush yang terancam di mata pemilihnya, namun juga kredibilitas bangsa Amerika di mata masyarakat internasional”.¹¹⁹

Masih menurut Sriyono, dunia internasional curiga bahwa isu pelucutan senjata pemusnah massal hanya merupakan *pretext for war*. Melalui peperangan, AS dapat menumbangkan Saddam Hussein, memperoleh akses minyak, dan menyebarkan nilai-nilai demokrasi di Irak. Universalisasi nilai-nilai demokrasi diharapkan menyebar di seluruh kawasan. Perang sekaligus dimaksudkan sebagai

¹¹⁸ Agus Sriyono, *Hubungan Internasional: Percikan Pemikiran Diplomat Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama-Jakarta 2004, hal. 180

¹¹⁹ *Ibid*, hal. 183

“pesan” bagi “rogue states” (negara-negara bengal) di sekitarnya: barang siapa tidak tunduk kepada kemauan AS, akan mengalami nasib sama seperti Irak.

Suara keras yang menentang rencana serangan AS ke Irak pun makin meluas. Dalam komunike yang dikeluarkan pada akhir Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) darurat di Doha, Qatar, 5 Maret 2003, ke-57 negara anggota OKI atau OIC (*Organization of Islamic Conference*) satu suara dalam menolak serangan AS. Suara OKI sejalan dengan hasil KTT Liga Arab maupun gerakan Non-Blok (GNB).¹²⁰

Kebijakan-kebijakan AS yang cenderung militeristik memang telah berdampak luas. Sentimen anti-Amerika merebak hampir di seluruh belahan dunia. Sebuah jajak pendapat yang dilakukan di Kanada mengungkapkan, bukan Saddam atau Korea Utara yang menjadi ancaman terbesar perdamaian dunia saat ini. 1/3 penduduk Kanada berpendapat Amerika Serikat adalah ancaman terbesar perdamaian dunia saat ini. Dalam survey tersebut, Amerika disebut-sebut dua kali lebih berbahaya dibandingkan Irak, Korea Utara, bahkan Al-Qaeda.

Sementara itu, jajak pendapat dengan topik yang sama dilakukan oleh majalah *Time* di Eropa. Menurut jajak pendapat tersebut, 80% penduduk Eropa menganggap Amerika sebagai ancaman bagi perdamaian dunia. Sedang Irak dan Korea Utara hanya 10% saja.¹²¹

¹²⁰ Riza Sihbudi, *Jurnal Demokrasi dan HAM: Tatanan Dunia Pasca Invasi AS ke Irak*, Vol. 3, No.2, Mei – September 2003, hal. 32

¹²¹ *Ibid*, hal. 12

Kenyataan ini membuktikan bahwa masyarakat internasional sudah tidak percaya pada propaganda Bush dan pemerintahannya mulai kehilangan kredibilitas tidak hanya di kalangan negara-negara yang selama ini terkenal kritis terhadap kebijakan Washington, tetapi bahkan di kalangan sekutu-sekutunya. Perancis dan Jerman, sekutu AS di NATO menolak mendukung rencana serangan Bush.

Bagaimanapun juga, kuatnya pengaruh Lobi Yahudi dalam pemerintahan Bush di AS telah mengakibatkan penyusunan kebijakan luar negeri AS terhadap Timur Tengah selalu di arahkan untuk melindungi kepentingan Israel. Pemerintahan Bush secara konsisten mendukung Israel dan menyebabkan kebijakannya terhadap negara-negara lain di Timur Tengah menjadi sangat tidak berimbang. Hal ini ternyata berdampak luas dan pada akhirnya, Amerikalah yang menanggung semuanya.

Lobi Yahudi telah menjadikan pemerintahan Bush mengesampingkan serta mengabaikan kepentingan nasional AS dalam kebijakan luar negerinya di Timur Tengah. Ini berarti, secara langsung maupun tidak langsung, lobi Yahudi juga turut andil dalam setiap kehancuran demi kehancuran yang dialami AS. Kerugian secara ekonomi akibat biaya perang yang luar biasa besar, merebaknya sentiment anti-Amerika di hampir seluruh belahan dunia, dan juga situasi sosial masyarakat AS yang senantiasa dihantui ancaman terror dari kelompok-kelompok radikalisme Islam yang tidak pernah berhenti memperjuangkan hak-hak bangsanya yang dirampas merupakan buah dari aktivitas lobi.

Jika memang demikian, menjadi tidak berlebihan apa yang diungkapkan oleh Mantan analis CIA, Kathleen Christon, pada tahun 1988:

“...., AIPAC telah menjadi mitra dalam penyusunan kebijaksanaan...Komite Urusan Publik Israel-Amerika itu telah menyusup sedemikian jauh di gedung putih dan juga di kongres sehingga mustahil untuk memastikan di mana tekanan lobi itu akan berhenti dan pemikiran presiden yang independen dimulai”.¹²²



¹²² Paul Findley, *Diplomasi Munafik Ala Yahudi*, terjemahan Rahmani Astuti, Penerbit Mizan – Bandung 1995, hal. 147

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dominasi AS dalam arena politik internasional semakin menegaskan hegemoni negara tersebut sebagai kekuatan yang tidak tertandingi. AS tampil sebagai pemimpin dunia yang menguasai dunia layaknya sebuah imperium. Kekalahan Uni Soviet dalam perang dingin sekaligus mengukuhkan posisi AS sebagai satu-satunya negara super power.

Kendati demikian, kenyataan tersebut di atas menjadi sangat kontradiktif ketika diperhadapkan pada realitas aktivitas lobi Yahudi dalam tatanan politik dan pemerintahan di AS. Kontradiksi tersebut bukan terletak pada komunitas lobinya, atau pada aktivitas yang dijalankan melainkan pada “pengaruhnya” dalam mengubah dan mengarahkan kebijakan luar negeri AS sesuai dengan kepentingan lobi.

AS sebagai negara adidaya tampak begitu lemah dihadapan lobi Yahudi yang pro Israel. Komunitas lobi Yahudi bahkan mampu mengarahkan para perumus dan pengambil kebijakan luar negeri AS, khususnya kebijakan terhadap Timur Tengah, untuk menempatkan kepentingan nasional AS pada prioritas yang kesekian dan menjadikan kepentingan Israel sebagai prioritas utama.

Di samping itu, lobi Yahudi juga, melalui anggota-anggota jaringan mereka termasuk kalangan konservatif tradisional dan neo-konservatif, berperan dalam menciptakan evolusi kebijakan luar negeri dan pertahanan AS dari multilateralisme dan

deterrence menuju ke kebijakan yang unilaterisme dan *pre-emption*. Tidak berlebihan apabila kondisi ini menyebabkan banyak pihak beranggapan bahwa ternyata Amerika Serikat sebagai sebuah negara hanyalah sebuah perwajahan, sedang otak dan jiwanya adalah Yahudi.

Ada banyak kelompok lobi Yahudi yang berperan besar dalam menciptakan kondisi tersebut di atas, tetapi yang paling kuat dan berpengaruh adalah AIPAC (*American-Israel Public Affairs Committee*). Kelompok lobi Yahudi yang bertujuan menjaga hubungan AS-Israel ini bergerilia dalam tatanan politik tingkat tinggi di AS. Organisasi kunci di Lobi ini dikendalikan oleh tokoh-tokoh garis keras yang secara umum mendukung kebijakan ekspansi partai Likud (partai yang berkuasa di Israel).

Formasi pemerintahan AS menawarkan banyak cara bagi kelompok kepentingan untuk mempengaruhi proses sebuah kebijakan. Kelompok-kelompok yang berkepentingan dapat melobi anggota legislatif dan para eksekutif pengambil keputusan dengan sumbangan untuk kampanye, suara saat pemilu, menggiring opini publik, dan sebagainya. Dan hal ini dimanfaatkan secara sangat baik oleh AIPAC.

Sumbangan yang sangat besar untuk kampanye, memberikan suara saat pemilu dan tidak berhenti menggiring opini publik untuk mendukung kandidat tertentu karena media yang juga telah mereka kuasai, menjadikan banyak kandidat memanfaatkan AIPAC sebagai pintu masuk menuju kekuasaan. Disaat yang bersamaan, mereka telah masuk dalam jerat komunitas lobi ini. Hal ini yang menyebabkan AIPAC menjadi begitu mudah mempengaruhi kebijakan AS.

Lobi Israel memainkan dua strategi ampuh. Pertama, memanfaatkan pengaruh luar biasa mereka di Washington, menekan kongres AS dan jajaran eksekutif pemerintah. Kedua, lobi ini berusaha keras agar publik selalu menilai positif posisi Israel. Tujuannya, mencegah komentar-komentas kritis muncul di arena politik. Mengendalikan perdebatan juga penting untuk menjamin dukungan AS terhadap Israel, sebab pembicaraan terang-terangan tentang kolusi AS-Israel dapat menggiring rakyat Amerika menerapkan kebijakan yang berbeda. Dan yang menjadi pilar kunci dari efektifitas lobi Yahudi adalah pengaruhnya di Kongres AS.

Situasi ini menjadi semakin parah ketika AS di bawah kendali Presiden George W. Bush. Kebijakan AS menjadi semakin mudah dikendalikan oleh komunitas lobi Yahudi karena komposisi pemerintahan Bush dikelilingi oleh tokoh-tokoh anggota jaringan lobi Yahudi seperti: Elliot Abrams, John Bolton, Douglas Feith, Lewis Libby, Richard Perle, Paul Wolfowitz, David Wurmser, Condoleeza Rice, dll. Mereka secara konsisten melaksanakan kebijakan yang diterapkan Israel dan dilindungi oleh pelbagai organisasi yang tergabung dalam lobi.

Peristiwa tragis 11/9 menjadi semacam pemantik bagi pemerintahan Bush untuk menerapkan kebijakan militeristiknya. Negara-negara independen diserang secara sepihak oleh AS dengan ataupun tanpa persetujuan PBB. Kebijakan perang Bush ini ditempatkan dalam satu bingkai "perang melawan terorisme". Kalangan konservatif tidak mau kehilangan momen untuk merealisasikan doktrin *pre-emption strike*. Negara-negara Timur Tengah yang dipandang cukup potensial mengganggu eksistensi Israel di kawasan tersebut dihancurkan dengan tujuan menjadikan Israel

lebih aman dan bukan atas dasar kepentingan nasional AS. Dan sekali lagi, lobi Yahudi berada di belakang semua ini.

Akan tetapi, sikap unilateris Bush dan kebijakan militeristiknya pada akhirnya membawa Bush pada kehancuran. Banyak pihak mulai memandang bahwa perang melawan terorisme yang selalu dikumandangkan Bush hanya untuk menjustifikasi tindakan perangnya. Bush semakin kehilangan legitimasi baik dalam negeri maupun di dunia internasional, dan citra Amerika semakin buruk di mata dunia. Sentimen anti-Amerikapun merebak di mana-mana.

Akhirnya, aktivitas lobi Yahudi telah berhasil membawa pemerintahan Bush menjadi rezim agresor. Kebijakan perang Bush telah menjadikan Israel semakin aman. Akan tetapi, di saat yang bersamaan, bangsa Amerika justru semakin kehilangan rasa aman karena terus diperhadapkan pada ancaman teror dari kelompok radikalisme Islam yang berjuang untuk hak-hak bangsanya. Situasi sosial politik dalam negeri AS diwarnai dengan demonstrasi menentang kebijakan perang Bush.

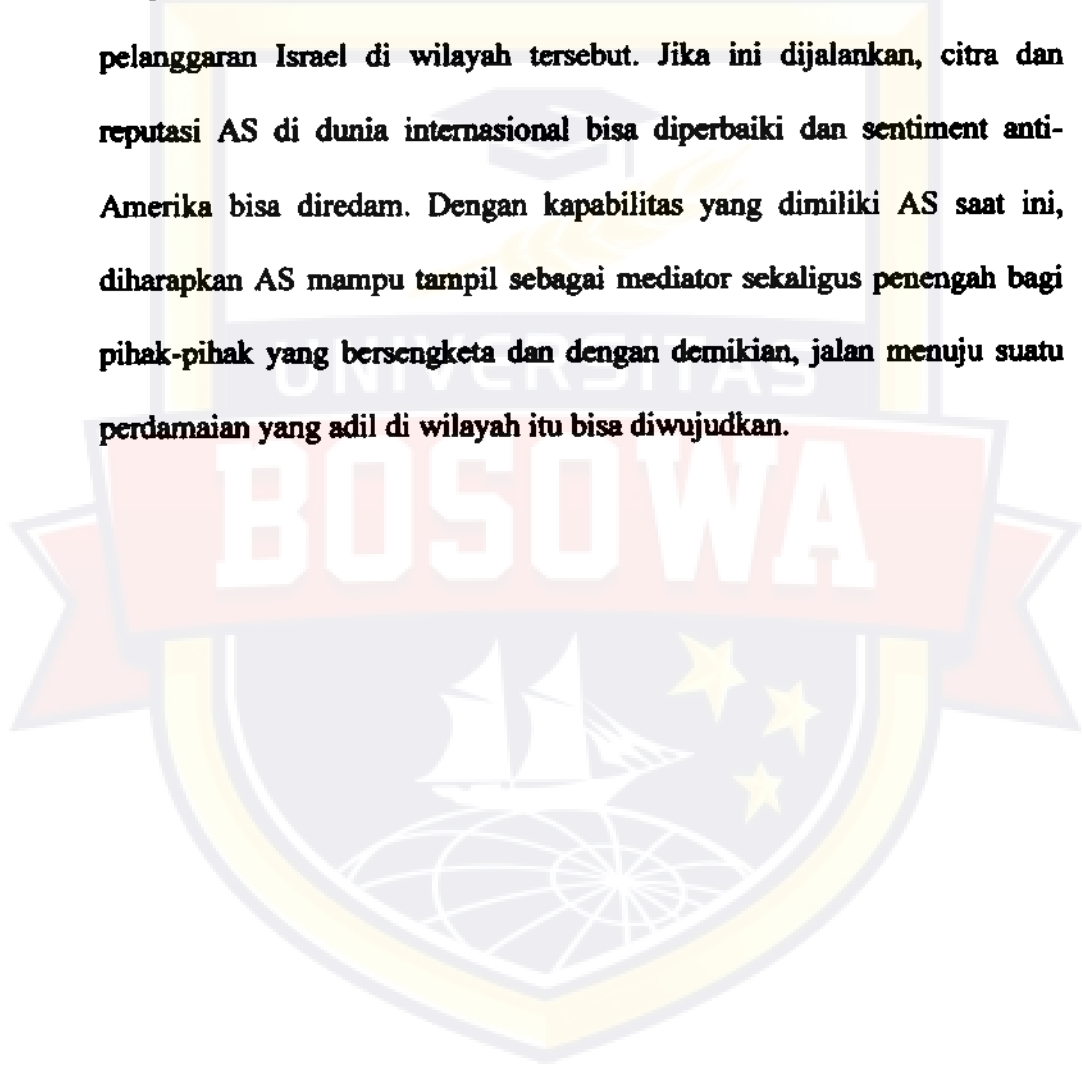
Dengan demikian, aktivitas lobi telah berdampak tidak hanya pada kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah yang sangat tidak berimbang, akan tetapi juga menjadikan Bush kehilangan legitimasi politiknya. Jika tidak ada aktivitas lobi, maka kebijakan AS di Timur Tengah akan lebih berimbang. Dan jika tidak ada aktivitas lobi Yahudi maka kebijakan luar negeri AS akan lebih sesuai dengan kepentingan nasional dan dengan sendirinya kepemimpinan Bush akan mendapatkan legitimasi baik dari masyarakat AS maupun dari dunia Internasional.

B. Saran-Saran

Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang ada, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

- Untuk bisa menghindari tekanan lobi Yahudi, pemerintah AS, baik eksekutif maupun legislatif harus bisa mengurangi ketergantungan mereka terhadap dukungan finansial maupun sumbangan dalam bentuk lain yang diberikan organisasi lobi Yahudi pada saat PEMILU sehingga dengan demikian, bisa menghindari mereka dari jerat lobi. Sebagaimana diketahui, salah satu pilar kunci efektivitas lobi Yahudi adalah dukungan dalam bentuk uang dan suara pada saat PEMILU. Dengan demikian, mengurangi ketergantungan terhadap dukungan komunitas lobi Yahudi, sama artinya dengan memutus mata rantai kekuatan lobi Yahudi dalam tubuh pemerintahan AS.
- Independensi dan kebebasan pers harus ditegakkan. Hal ini penting mengingat fungsi pers sebagai kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah. Selain itu, pers yang independen diharapkan bisa menyajikan informasi yang sesuai dan berimbang. Media-media di AS selama ini telah berada di bawah kontrol lobi Yahudi dan olehnya, nyaris tidak ada pemberitaan yang berseberangan dengan kepentingan organisasi lobi ini. Buntutnya, masyarakat AS hampir tidak pernah memperoleh informasi yang sesuai dengan realitas sesungguhnya.

- Para pengambil kebijakan AS sebisa mungkin merumuskan kebijakan politik luar negeri AS di Timur Tengah seimbang mungkin. Hal ini tentunya dengan didasarkan pada penetapan situasi yang disesuaikan dengan informasi yang akurat dan lengkap termasuk tentang pelanggaran-pelanggaran Israel di wilayah tersebut. Jika ini dijalankan, citra dan reputasi AS di dunia internasional bisa diperbaiki dan sentiment anti-Amerika bisa diredam. Dengan kapabilitas yang dimiliki AS saat ini, diharapkan AS mampu tampil sebagai mediator sekaligus penengah bagi pihak-pihak yang bersengketa dan dengan demikian, jalan menuju suatu perdamaian yang adil di wilayah itu bisa diwujudkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, Musthafa, 2003. Iran Pasca Revolusi: Fenomena Pertarungan Kubu Reformis dan Konserfatif, Jakarta : Kompas
- As-Samarani, As'ad. 2005. Menyingkap Terorrisme Dunia, penerjemah Erwin Yuandani, Solo : Intermedia.
- As'ari, Deni K., 2006. Kamus Istilah Politik dan Kewarganegaraan, Bandung : Yrama Media.
- Banyu Permita, Anak A., dan Yani, Yanyan M., 2005. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Coplin William, 2003. Pengantar Politik Internasional, Alih bahasa M. Marbun, Bandung: sinar baru
- Findley, Paul, 1993. Diplomasi Munafik Ala Yahudi : Mengungkap Fakta Hubungan AS-Israel, Terjemahan R. Astuti. Bandung : Mizan.
- Hadibroto, I., dkk., 2002. Dibalik Perseteruan AS vs Taliban : Perang Afganistan, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Hermawati, 2005. Sejarah Agama dan Bangsa Yahudi, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- Holsti, K.J.,1992. Politik Internasional: suatu kerangka analisis, Bandung: Bina Cipta
- Katz, J., 1997. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Zionisme, penerjemah Joko Susilo, Surabaya : Pustaka Progresif.
- Mas'oad, M., 1994. Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi, Jakarta : LP3ES.
- Mearsheimer John dan Stephen Walt, 2007. The Israel Lobi and US Foreign Policy, terjemahan R.Hidayat, Jakarta: Penerbit Kalam Indonesia.
- Nurdi Herry, 2006. Lobi Zionis dan Rezim Bush, Jakarta: Penerbit Hikmah
- Plano Jack C. dan Roy Olton, 1999. Kamus Hubungan Internasional Bandung: Abardin
- Raliby, O., 1982. Kamus Internasional, Jakarta : Bulan Bintang.

Rudy, T. May, 2003. Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-masalah Global : Isu, Konsep, dan Paradigma, Bandung : Refika Aditama.

Sriyono, Agus,dkk, 2004. Hubungan Internasional: Percikan Pemikiran Diplomat Indonesia, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Todd, E., 2006. Menjelang Keruntuhan Amerika, penerjemah Siwi Purwandari, Bekasi : Menara.

SUMBER-SUMBER LAIN:

- ❖ Jurnal Demokrasi dan HAM: Tatanan Dunia Pasca Invasi AS ke Irak, Vol. 3, No.2, Mei – September 2003.
- ❖ Surat Kabar KOMPAS edisi kamis, 20 April 2006
- ❖ Surat Kabar KOMPAS edisi jumat, 28 April 2006
- ❖ Harian Seputar Indonesia edisi jumat, 10 November 2006
- ❖ http://www.irib.ir/worldservice/melavuRADIO/POLITIK/mei04/plan_attack.htm
- ❖ <http://www.mailarchive.com/tamanbintang@yahoo.com/msg00317.html>